

**UPAYA PENINGKATAN KINERJA PERSONIL SATUAN
RESERSE DAN KRIMINAL (SATRESKRIM) DALAM
MENANGANI CURANMOR DI KABUPATEN BULUNGAN**



SKRIPSI

Untuk Memperoleh Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

ZAINAL ARIFIN
NPM. 201651043

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

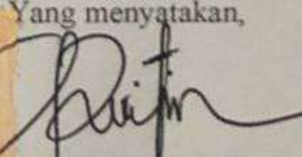
Nama : Zainal Arifin
NPM : 201651043
Program Studi : Administrasi Negara

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi saya berjudul **UPAYA PENINGKATAN KINERJA PERSONIL SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL (SATRESKRIM) DALAM MENANGANI CURANMOR DI KABUPATEN BULUNGAN** adalah skripsi otentik karya saya sendiri yang belum pernah diajukan oleh peneliti lain, baik untuk memperoleh gelar kesarjanaan maupun dimuat dalam artikel, jurnal ataupun surat kabar.

Seluruh kutipan, pendapat, opini dan tulisan yang ada dalam skripsi ini selain pendapat saya sendiri, mencantumkan sumbernya secara lengkap yang bertanggungjawab.

Apabila kelak di kemudian hari, terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik apapun, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tanjung Selor, 11 Februari 2022

Yang menyatakan,


ZAINAL ARIFIN
NPM. 201651043

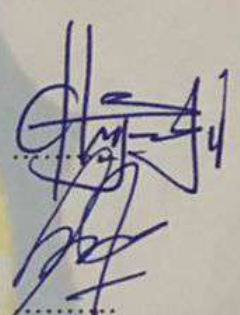
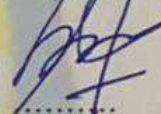
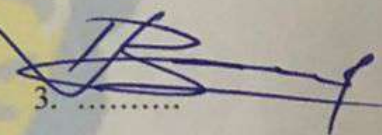
PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : UPAYA PENINGKATAN KINERJA PERSONIL
SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL
(SATRESKRIM) DALAM MENANGANI
CURANMOR DI KABUPATEN BULUNGAN

DISUSUN OLEH : ZAINAL ARIFIN
NPM. 201651043

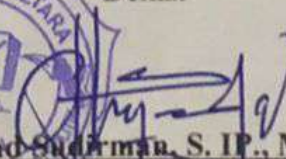
Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

- | | | |
|-------------------------|--|--|
| 1. Ketua/Penguji 1 | Irsyad Sudirman, S. IP., M.I.P
NIDN. 1103017701 | 1.  |
| 2. Sekretaris/Penguji 2 | K. Rapiandi Isak Merang, S. Pd., M. Pd
NIDN. 1104068802 | 2.  |
| 3. Pembimbing/Penguji 3 | Budi Mulyadi, S. IP., M.I.P
NIDN. 1108047601 | 3.  |

Tanjung Selor, 27 Januari 2022

Universitas Kaltara
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Dekan

Irsyad Sudirman, S. IP., M.I.P
NIDN. 1103017701

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Upaya Peningkatan Kinerja Personil Satuan Reserse dan Kriminal (SATRESKRIM) Dalam Menangani Curanmor di Kabupaten Bulungan” ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana (Sl) Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang turut berpartisipasi memberikan dukungan dan motivasi secara konstruktif baik langsung maupun tidak langsung, untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Abdul Jabarsyah, M. Sc, selaku Rektor Universitas Kaltara di Tanjung Selor beserta seluruh jajarannya;
2. Bapak Irsyad Sudirman. S.I.P., M.I.P selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara di Tanjung Selor sekaligus sebagai Dosen Penguji 1;
3. Bapak Syaini, S. Sos., M.I.P selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Kaltara di Tanjung Selor;
4. Bapak Budi Mulyadi, S.I.P., M.I.P selaku Dosen Pembimbing Skripsi;
5. Bapak K. Rapiandi Isak Merang, S. Pd., M. Pd selaku Dosen Penguji 2;
6. Para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara;
7. Kepala Kepolisian Resor Bulungan beserta seluruh jajarannya yang telah memberi izin penelitian dan data penelitian;
8. Kedua orangtua dan saudara-saudaraku tercinta;
9. Pihak-pihak berkepentingan yang turut berperan serta memberikan dukungannya dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran bersifat membangun sangat diharapkan sebagai penyempurnaan dalam skripsi ini, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanjung Selor, 27 Januari 2022

Penulis

Zainal Arifin

**UPAYA PENINGKATAN KINERJA PERSONIL SATUAN RESERSE DAN
KRIMINAL (SATRESKRIM) DALAM MENANGANI CURANMOR DI
KABUPATEN BULUNGAN**

**Oleh:
Zainal Arifin
NPM. 201651043
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara**

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan. Untuk mengetahui faktor faktor pendukung dan faktor penghambat peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan.

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Kualitatif. Dengan pemilihan informan yaitu Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan, Personil Satreskrim Polres Bulungan sebanyak 3 orang, dan warga masyarakat Kabupaten Bulungan. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, Observasi, dan dokumentasi/Catatan Lapangan. Teknik analiis data yaitu pengumpulan data, reduksi data (penyederhanaan data), penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian yaitu upaya Peningkatan Kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Dalam Menangani Curanmor di Kabupaten Bulungan yaitu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan/diklat. Promosi dan Mutasi, bagi personil yang memiliki kemampuan dan memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Penilain kinerja Polri dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing personil. Penghargaan diberikan dalam bentuk sertfikat dan uang pembiaan,dan pujian yang bertujuan meningkatkan motivasi personil. Pemberdayaan Personil yaitu upaya untuk membangun kemampuan dalam bekerja sama, mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Fasilitas dan perlengkapan dalam menjalankan tugas menangani curanmor tentu dapat meningkatkan kinerja personil. Faktor pendukung peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan yaitu Kerja sama personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim), kesiapan dana, melakukan evaluasi, memiliki kemampuan secata fisik, dan adanya kegiatan pelatian. Sedangkan faktor penghambat peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan yaitu jumlah personil yang terbatas menghambat personil untuk melaksanakan tugas karena pembagian tugas

sangat berat, dan terbatasnya teknologi informasi yang digunakan oleh personl dalam menjalankan tugas.

Kata Kunci : Upaya, Peningkatan Kinerja, Personil, Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim), Curanmor

**EFFORTS TO INCREASE PERFORMANCE OF PERSONNEL OF THE
RESERSE AND CRIMINAL UNIT (SATRESKRIM) IN HANDLING THE
CURANMOR IN BULUNGAN DISTRICT**

By :

Zainal Arifin

NPM. 201651043

***State Administration Study Program
Faculty Of Social and Political Science
Kaltara University***

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the efforts to improve the performance of the detective and criminal unit personnel (Satreskrim) in dealing with theft in Bulungan Regency. To find out the supporting factors and inhibiting factors in improving the performance of the detective and criminal unit personnel (Satreskrim) in dealing with theft in Bulungan Regency.

This study the author uses the type of qualitative research. With the selection of informants, namely the Head of the Criminal Investigation Unit of the Bulungan Police, 3 members of the Criminal Investigation Unit of the Bulungan Police, and the community members of the Bulungan Regency. Data collection techniques are interviews, observations, and documentation/field notes. Data analysis techniques are data collection, data reduction (simplification of data), data presentation, and drawing conclusions

The results of the research are efforts to improve the performance of the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) Personnel in Handling theft in Bulungan Regency, namely through education and training/training. Promotions and Transfers, for personnel who have the ability and have higher education. The National Police's performance appraisal is intended to measure the performance of each personnel. Awards are given in the form of certificates and tuition fees, and compliments aimed at increasing the motivation of personnel. Personnel Empowerment is an effort to build the ability to work together, encourage, motivate, and raise awareness of one's potential. Facilities and equipment in carrying out the task of handling theft can certainly improve personnel performance. Supporting factors for improving the performance of the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) personnel in dealing with theft in Bulungan Regency are the cooperation of the Criminal Investigation Unit (Satreskrim) personnel, the readiness of funds, conducting evaluations, having physical abilities, and the existence of training activities. While the inhibiting factors for improving the performance of the detective and criminal unit personnel (Satreskrim) in dealing with theft in Bulungan Regency are the limited number of

personnel preventing personnel from carrying out their duties because the division of tasks is very heavy, and the limited information technology used by personnel in carrying out their duties.

Keywords : *Efforts, Performance Improvement, Personel, Criminal Investigation Unit (SATRESKRIM), Curanmor*

RIWAYAT HIDUP

Zainal Arifin, lahir pada tanggal 21 Oktober 1995 di Tarakan, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan suami istri bernama Bapak Wiwit Wahyono dan Ibu Eka Suharti, S.E.

Pada tahun 2001 memulai pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN Utama 1 Tarakan dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikannya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 2 Tanjung Selor dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu penulis melanjutkan kembali pendidikan formal untuk jenjang Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri 1 Tanjung Selor pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2013.

Pada pertengahan tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan formal jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Kaltara di Tanjung Selor dan diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPS	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	8
1. Kinerja	8
a. Definisi Kinerja	8
b. Penilaian Kinerja	9
2. Kepolisian	13
a. Fungsi Kepolisian	14
b. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	15
c. Standar Kepolisian Yang Baik	20
B. Studi Penelitian Terdahulu	27
C. Alur Pikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Penetapan Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C. Fokus Penelitian	32
D. Pemilihan Informan	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33

F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
1. Sejarah Berdirinya Polres Bulungan	37
2. Nama Kapolres Bulungan Tahun 1989 – 2021	43
3. Data Personil Polres Bulungan 22 November 2021 Perpol Nomor 2 Tahun 2021.....	44
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	47
1. Peningkatan Kinerja Personil Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Dalam Menangani Curanmor di Kabupaten Bulunga..	47
a. Pendidikan dan Pelatihan	47
b. Promosi dan Mutasi.....	51
c. Penilaian Kinerja Polri	52
d. Penghargaan	54
e. Pemberdayaan dan Perlindungan Polri.....	57
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peningkatan Kinerja Personil Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Dalam Menangani Curanmor di Kabupaten Bulungan.....	59
a. Faktor Pendukung.....	59
b. Faktor Penghambat.....	62
C. Pembahasan.....	64
1. Upaya Peningkatan Kinerja Personil Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Dalam Menangani Curanmor di Kabupaten Bulungan	64
a. Pendidikan dan Pelatihan	64
b. Promosi dan Mutasi.....	67
c. Penilaian Kinerja	68
d. Penghargaan	69
e. Pemberdayaan dan Perlindungan Polri.....	70
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peningkatan Kinerja Personil Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Dalam Menangani Curanmor di Kabupaten Bulungan.....	71
a. Faktor Pendukung.....	72
b. Faktor Penghambat.....	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
4.1.	Nama Kapolres Bulungan Tahun 1989-2021.....	43
4.2.	Data Personel Polres Bulungan Tahun 2021	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	30
Gambar 3.2	Komponen Analisis Data Model Interaktif	35
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Polres Bulungan	46
Gambar 4.2	Sertifikat Pelatihan	50
Gambar 4.3	Piagam Penghargaan	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Lembar pedoman tanyajawab kepada informan
- Lampiran 2. Surat izin pelaksanaan penelitian
- Lampiran 3. Surat keterangan sudah melakukan penelitian
- Lampiran 4. Dokumentaasi kegiatan penelitian
- Lampiran 5. Bukti konsultasi proposal penelitian dan skripsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masala

Pembangunan nasional merupakan suatu kondisi ideal yang menjadi tujuan utama dari pencapaian cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, aman, tentram, damai dan mandiri sehingga tercipta sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang madani. Keniscayaan tersebut bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan, namun juga bukan hal yang mustahil untuk dicapai dengan syarat terwujudnya supremasi hukum. Dalam upaya mewujudkan supremasi hukum, Polri sebagai bagian dari aparat penegak hukum, memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan harapan tersebut, karena dalam pelaksanaan tugasnya dibidang perlindungan, pelayanan, pengayoman dan penegakan hukum, Polri akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, dimana hal ini akan mempengaruhi akselerasi program kerja jangka panjang Polri yang terumuskan dalam Grand Strategi Polri 2005-2025.

Tugas pokok pemerintahan negara menggambarkan bahwa tugas kepolisian dan pembinaan masyarakat merupakan tugas-tugas pemerintahan. Secara kelembagaan, dapat dikatakan bahwa kepolisian menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintahan, di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, eksistensi lembaga kepolisian dalam suatu negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat yang disebut sebagai ketertiban internal (internal order).

Penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian akan sangat mempengaruhi baik (good) dan buruknya (ugly) suatu organisasi. Hal ini disebabkan obyek atau sasaran tugas yang dihadapi sehari-hari oleh kepolisian adalah masyarakat atau rakyat dalam negara. Oleh karena itu, agar tugas pokok tersebut dapat berjalan dengan baik, maka organisasi kepolisian dituntut untuk berupaya keras meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari setiap sumber daya yang dimiliki, terutama sumberdaya manusianya. Kondisi tersebut dapat dipahami karena sumberdaya manusia dianggap paling penting. Dalam mendayagunakan manusia, potensi fisik dan psikis yang dimilikinya harus diupayakan agar dapat berfungsi secara maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi.

Pemberdayaan sumberdaya manusia dalam organisasi termasuk kepolisian harus diarahkan pada terbentuknya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam organisasi secara maksimal, yang hasil akhirnya dapat dilihat dari adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat (publik). Pentingnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia menunjukkan bahwa faktor tersebut (manusia berkualitas) menjadi determinan dari keberhasilan pembangunan dalam

berbagai bidang. Pembangunan sumber daya manusia yang baik dapat dilihat dari kinerja sumber daya manusia itu sendiri.

Individu menjadi motor penggerak jalannya organisasi, tercapainya tujuan organisasi salah satunya sangat bergantung pada baik buruknya kinerja pegawai (Indarjanti & Bodroastuti, 2012). Dengan demikian, semakin jelas bahwa kinerja yang baik, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan sangat penting untuk diwujudkan. Kinerja yang baik dari pegawai akan mengakibatkan kegiatan organisasi berjalan dengan lancar, sehingga pada akhirnya dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Kinerja pegawai merupakan faktor penting yang turut mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Mengingat pentingnya kinerja pegawai bagi tercapainya tujuan organisasi. Dalam organisasi Kepolisian, kinerja personil tentunya juga memiliki peranan yang sangat penting. Sejalan dengan ttugas kepolisian, salah satu badan utama dalam kepolisian yang menunjang kinerja seluruh organisasi kepolisian dalam menangani kriminalitas adalah Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim). Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PNS.

Seiring dengan banyaknya tindak kriminal di berbagai daerah, Satreskrim juga dituntut untuk memiliki kinerja yang baik, termasuk pada Satreskrim Polres Bulungan. Salah satu tindak kriminal yang banyak terjadi di Kabupaten Bulungan

adalah pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Walaupun rata-rata kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) terjadi karena kelalaian pemiliknya, namun hal ini tentu tidak dapat diabaikan begitu saja. Perlu penanganan khusus, yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Bulungan untuk mengurangi angka kejahatan ini, mengingat bahwa tindak kriminal curanmor seringkali dilakukan oleh sindikat.

Kondisi tindak curanmor yang cukup banyak di Kabupaten Bulungan menuntut peningkatan kinerja personil Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim). Tantangan ke depan yang semakin kompleks dan upaya pencapaian kinerja sangatlah wajar dilakukan. Bahkan untuk jumlah personel di Polres Bulungan pun masih kekurangan. Berdasarkan Daftar Susunan Personel Polri (DSPP) di lingkungan Polres Bulungan, masih memerlukan sekira 1.500 personel. Saat ini jumlah personel mencapai 400 orang. Berkaitan satuan yang masih minim personel, seperti Reserse Kriminal (Satreskrim), Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), Satuan Lalu Lintas (Satlantas) dan Satuan Sabhara (Satsabhara). Kekurangan personil ini juga menyebabkan semakin tingginya tuntutan akan peningkatan kinerja personil agar dapat memberantas tindak kriminal di Kabupaten Bulungan.

Studi pendahuluan menunjukan bahwa kinerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bulungan dapat dikatakan cukup baik dalam memberantas tindak kriminal, khususnya tindak kriminal pencurian kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus curanmor yang berhasil ditangani dan

diungkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bulungan. Salah satunya yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2019. Seorang pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) yang kerap beraksi di wilayah Kaltara, akhirnya berhasil diungkap oleh jajaran Satuan Reskrim Polres Bulungan. Pelaku pencurian motor (curanmor) yang diketahui berinisial Z itu diamankan di Jalan Manggis, Tanjung Selor. Z memang merupakan pelaku curanmor yang kerap beraksi di wilayah Kaltara. Khusus untuk di Kabupaten Bulungan sendiri, Z mengaku telah melakukan pencurian di 20 TKP berbeda (<https://korankaltara.com/residivis-curanmor-keok-di-tangan-polisi/>, diakses 15 Juni 2020).

Kasus lainnya terjadi pada bulan yang sama. Seorang residivis pencurian motor (curanmor) yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Bulungan, dibekuk jajaran Jatanras Sat Reskrim Polres Bulungan pada Sabtu tanggal 26 Oktober 2019. Sebelum mengamankan pelaku yang diketahui berinisial HE, tim Jatanrans Sat Reskrim Polres Bulungan terlebih dulu berkoordinasi dengan tim Jatanrans Sat Reskrim Polres Berau. Aksi pencurian yang dilakukan HE terjadi pada 2018 silam. Namun, pihaknya baru berhasil menangkap pelaku setelah domisilinya diketahui. Lanjut dia, selama ini HE kabur hingga Kabupaten Berau setelah melakukan pencurian di Bulungan (<https://korankaltara.com/tangkap-residivis-curanmor-dua-polres-turun-tangan/>, diakses 15 Juni 2020).

Berdasarkan kedua contoh kasus yang berhasil diungkap tersebut dapat diketahui bahwa kinerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bulungan dapat dikatakan cukup baik. Naun demikian, karena tindak kriminal ini cukup

banyak dan melibatkan sindikat, maka kinerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bulungan dalam memberantas tindak kriminal curanmor senantiasa harus ditingkatkan.

Sejauh ini, kinerja Reserse Kriminal (Satreskrim) cukup baik dalam menangani tindak kriminal curanmor. Reserse Kriminal (Satreskrim) selama ini selalu berperan aktif dan bertindak cepat dalam menangani kasus curanmor. Upaya penanganan tindak kriminal curanmor oleh Kepolisian Polres Bulungan memerlukan kinerja yang baik dari personil unit itu sendiri. Mengingat banyaknya tindak kriminal ini dengan jumlah yang senantiasa meningkat maka upaya peningkatan kinerja personil Satreskrim Polres Bulungan juga harus dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Upaya Peningkatan Kinerja Personil Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Dalam Menangani Curanmor di Kabupaten Bulungan”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui upaya peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan.
2. Untuk mengetahui faktor faktor pendukung dan faktor penghambat peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah teoritis dan pengetahuan serta sebagai tempat atau wadah untuk menerapkan teori-teori tentang kinerja pegawai dan upaya peningkatannya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan masukan yang berkaitan dengan berbagai persoalan tentang upaya peningkatan kinerja personil khususnya pada Lembaga kepolisian, dan penelitian ini diharapkan membantu pengembangan konsep yang bermanfaat bagi ilmu administrasi negara, khususnya kajian terkait dengan kinerja personil dalam suatu organisasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Kinerja

a. Definisi Kinerja

Istilah kinerja berasal dari kata *performance* atau *actual performance*. Prawirosentono (2008: 2) mengungkapkan bahwa kinerja atau *performance* merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Kinerja adalah konsep yang bersifat universal yang merupakan efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan bagian karya berdasar standar dan kriteria yang ditetapkan.

Kinerja merupakan perilaku manusia dalam suatu organisasi yang memenuhi standar perilaku yang ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sehubungan dengan kinerja personil sebagai individu yang terdapat dalam organisasi, menurut Sutrisno (2010: 171) kinerja personil adalah prestasi yang diperoleh oleh seseorang dalam melakukan tugas, Keberhasilan organisasi tergantung pada kinerja para pelaku organisasi yang

bersangkutan, Oleh karena itu, setiap unit kerja dalam suatu organisasi harus dinilai kinerjanya, agar kinerja sumber daya manusia yang terdapat dalam unit-unit dalam suatu organisasi tersebut dapat dinilai secara objektif.

Berdasarkan definisi-definisi kinerja dan kinerja personil yang telah diuraikan sebelumnya dapat dipahami bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan etika pekerjaannya. Kinerja personil adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya dalam suatu organisasi.

b. Penilaian Kinerja

Douglas MC Gregor menulis suatu artikel mengenai penilaian kinerja pada *Harvard Business Review* berjudul “*An Uneasy Look at Performance Appraisal*” (dalam Grote, 1996: 3). Pada artikel tersebut disebutkan bahwa penilaian kinerja formal didesain untuk memenuhi tiga kebutuhan (satu bagi organisasi dan dua bagi individu). Kebutuhan tersebut antara lain:

- 1) Memberikan pertimbangan sistematis untuk menentukan kenaikan gaji, promosi, pemindahan dan kadang kadang untuk penurunan jabatan dan hubungan kerja.
- 2) Menjadi suatu wahana untuk menjelaskan kepada para personil pencapaian kinerja mereka dan menyarankan perubahan perubahan

perilaku, sikap, keterampilan maupun pemahaman pekerjaan yang diperlukan.

- 3) Evaluasi kinerja ini menjadi semakin banyak dipergunakan sebagai dasar untuk bimbingan dan konseling para individu oleh para supervisor.

Unsur-unsur penilaian kinerja terdiri dari berbagai macam aspek. Seperti yang dijelaskan Umar (2005: 65) yang mengemukakan bahwa unsur penilaian kinerja terdiri dari:

- 1) Mutu pekerjaan
- 2) Kejujuran
- 3) Inisiatif
- 4) Kehadiran
- 5) Sikap
- 6) Kemampuan kerjasama
- 7) Keandalan
- 8) Pengertian tentang pekerjaan
- 9) Tanggung jawab terhadap tugas
- 10) Pemanfaatan waktu.

Penilaian kinerja merupakan sebuah prosedur yang meliputi mendefinisikan pekerjaan, menilai kinerja dan memberikan umpan balik. Dessler (2006: 79) mendefinisikan pekerjaan berarti antara atasan dan bawahan telah menyepakati standar standar pekerjaan dan jabatan tertentu. Menilai kinerja berarti membandingkan kinerja aktual dengan standar standar yang telah ditentukan tersebut. Pemberian umpan balik berarti membahas kinerja dan kemajuan, serta membicarakan ulang rencana rencana berikutnya berdasarkan hasil penelitian sebelumnya.

Sistem penilaian kinerja menurut Dessler (2006: 79) lebih mengarah pada pentingnya pemberlakuan penilaian kinerja. Dessler (2006: 79) menawarkan beberapa metode penilaian kinerja. Metode yang dimaksud tersebut antara lain metode skala penilaian grafik, metode peringkatan altermasi, metode perbandingan berpasangan, metode distribusi dan metode insiden kritis. Bagi Dessler diperlukan kombinasi dari berbagai metode penilaian baik dengan skala penilaian berdasarkan perilaku (BARS atau kepanjangan dari *behaviorally anchored rating scale*) maupun dengan manajemen berdasarkan sasaran (MBO, *Management by Objectives*).

Manajemen sumber daya manusia sangat penting terutama di Negara berkembang seperti Indonesia yang umumnya kelebihan sumber daya manusia. Dengan demikian diperlukan manajemen sumber daya manusia tingkat nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan sumber sumber daya manusia ke dalam pembangunan sehingga terjadi penggunaan sumber sumber daya manusia yang rasional dan efektif dengan kesempatan kerja yang penuh (*full employment*). Penilaian kinerja dipandang sebagai *performance appraisal* dan *performance evaluation*. Penilaian kinerja cenderung dilihat sama seperti penilaian prestasi kerja sehingga mendorong para personil untuk berlomba meningkatkan kinerjanya.

Penilaian kinerja merupakan sebuah prosedur yang meliputi: mendefinisikan pekerjaan, menilai kinerja dan memberikan umpan balik. Menilai kinerja berarti membandingkan kinerja aktual dengan standar standar

yang telah ditentukan. Sedangkan pemberian umpan balik berarti membahas kinerja dan kemajuan, serta membicarakan ulang rencana rencana berikutnya berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Semua langkah langkah dalam penilaian kinerja tadi, jelas jelas membutuhkan kesepahaman bersama yang bisa dipahami antara semua pihak yang berkompeten dengan jabatan atau pekerjaan tertentu.

Dessler (2006: 80) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. Kualitas kerja
2. Kuantitas kerja
3. Keandalan
4. Efektifitas
5. Kemandirian sumber lain
6. Hubungan interpersonal dan kerjasama

Robbins dan Judge (2004: 212) menjelaskan bahwa penilaian kinerja mempunyai sejumlah manfaat, yaitu :

1. Untuk membuat keputusan sumber daya manusia yang umum, misalnya untuk kepentingan promosi, transfer, pemutusan hubungan kerja dan sebagainya.
2. Identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan.
3. Sebagai suatu kriterium terhadap program seleksi dan pengembangan.
4. Sebagai dasar untuk alokasi imbalan.

2. Kepolisian

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah "polisi" mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti di Inggris menggunakan istilah "*police*", di Jerman "*polizer*", di Belanda "*politie*" dan di Amerika Serikat dipakai istilah "*sheriff*". Istilah *seriff* ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal adanya istilah "*constable*" yang mengandung arti tertentu bagi pengertian "*polisi*", yaitu: pertama, sebutan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian dan kedua berarti kantor polisi (*police constable*).

Pada awalnya istilah polisi berasal dari bahasa Yunani "*politeia*" yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan "*polis*", dimana pada jaman itu istilah "*polis*" memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keamanan atau penyembahan terhadap dewa-dewa. Baru setelah lahirnya agama Nasrani urusan agama dipisahkan, sehingga arti "*polis*" menjadi seluruh pemerintah kota di kurangi agama (Sadjijono, 2005 : 38).

Selanjutnya Sadjijono *at. al* (2005:41) mengatakan istilah "polisi" dan "kepolisian" dapat dimaknai sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur

dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang , yakni fungsi *preventif* dan fungsi *represif* ".Fungsi *preventif* melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi *represif* dalam rangka penegakkan hukum".

Dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat suatu negara.

a. Fungsi Kepolisian

Pengertian fungsi (*function*) secara harafiah adalah jabatan yang dilakukan atau pekerjaan yang dilakukan. Fungsi kepolisian sebagai pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang untuk dijalankan sebagaimana batas wewenangnya dengan penuh tanggungjawab. Amanat undang-undang ini disebut sebagai kewenangan. Dalam kamus populer pengertian fungsi ini juga diartikan sebagai peranan, jabatan, kegunaan, guna, manfaat bahkan kedudukan, namun jika kita kaji secara mendalam sangatlah berbeda, fungsi bukanlah peranan maupun kedudukan, akan tetapi sebagai induk pekerjaan yang harus dikontribusikan atau diurai dalam tugas. Soebroto Brotodiredjo (1984) mengartikan fungsi sebagai sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan

dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Penekanan dari arti fungsi tidak terlepas dari segi tugas, pekerjaan maupun jabatan sehingga fungsi mengandung arti suatu tanggung jawab yang melekat.

Hadjon (2002) mengatakan bahwa fungsi adalah berkaitan dengan tugas dan wewenang suatu lembaga untuk menjalankan jabatan atau pekerjaannya. Kaitannya dengan fungsi kepolisian oleh Franken (1983) dikatakan sebagai tugas dan wewenang lembaga kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.

Fungsi Kepolisian adalah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya peradaban manusia. Setiap kelompok manusia mulai merasakan perlunya keamanan, ketentraman dan mempertahankan kehidupannya, pada saat itulah sebenarnya fungsi polisi itu ada, tumbuh dan berkembang dan semakin jelas manakalah ancaman terhadap kelompok itu semakin nyata (Kunarto, 1997:45).

b. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Salah satu fungsi pemerintahan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dalam administrasi pemerintahan dilaksanakan oleh lembaga kepolisian. Disini tampak jelas, bahwa fungsi pemerintahan yang

diembang oleh kepolisian berupa tindakan nyata dalam menjalankan penegakkan hukum preventif maupun represif, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan tindakan mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat umum dalam rangka menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, oleh karena ketertiban masyarakat ini sangat diperlukan dalam negara dan sangat erat hubungannya dengan keamanan masyarakat, maka diperlukan dan harus ada suatu alat perlengkapan negara yang ditugaskan khusus untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri tersebut, yakni jawatan kepolisian (Sadjijono 2008:289).

Di sisi lain Projodikoro (dalam Sadjijono, *et.al.*, 2008:289) mengemukakan tugas pokok pemerintahan negara dalam sistem pemerintahan demokrasi ini meliputi, antara lain:

1. Mempertahankan negara terhadap gangguan dari luar berupa ancaman peran dari negara lain atau pihak swasta luar negeri yang ingin memperluas sayappperdagangannya ke dalam negeri, yang dapat dikatakan sebagai "kepastian ekstern" (*external security*); dan
2. Menjaga ketentraman dan keamanan ke dalam diantara para anggota masyarakat dari negara, agar terpenuhi kepentingan konkrit dari anggota masyarakat, agar sehari-harinya hidup bahagia, baik jasmaniah maupun rohaniah, sebagai wujud kesejahteraan rakyat, yang dapat dikatakan sebagai "ketertiban intern" (*internal order*).

Berangkat dari pengertian ini maka sebagai batasan dalam tulisan ini lebih terfokus pada point kedua yang merupakan fungsi pokok kepolisian yakni memelihara keamanan dan ketertiban bagi kehidupan masyarakat sebagai wujud pelayanan umum bagi masyarakat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Sadjijono, *et.al.*, (2008:69) yang dimaksud dengan "aman" adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tidak mengandung resiko, tentram tidak merasa takut, terlindung atau tersembunyi. Dengan demikian aman bersangkut paut dengan psikologis dan kondisi atau keadaan yang terbebas dari bahaya, gangguan, rasa takut maupun resiko.

Brotodirejo *et.al.*(dalam Sadjijono 2008:70) mengatakan "aman" diartikan mengandung empat unsure pokok, yaitu: perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psychis (*security*); perasaan bebas dari kekhawatiran (*surety*); perasaan bebas dari resiko (*safety*), dan perasaan damai lahiriah dan batiniah (*Peace*). Senada dengan pendapat ini dalam krida waspada (2004) [Jurnal](#) yang dikutip oleh penulis melalui internet "aman" (*secure*) adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh semua individu, kelompok masyarakat, instansi pemerintah, maupun perusahaan swasta bahkan sampai kepada sebuah negara atau dunia. Pengertian aman (*secure*) tidak hanya berarti aman secara fisik namun juga terhadap hal-hal non fisik, dengan demikian maka pengertian aman dapat diartikan sebagai terciptanya rasa bebas dari ketakutan terhadap: (1) kejahatan dan ancaman kejahatan;

(2) kerugian dan ancaman kerugian; dan (3) kegagalan dan ancaman kegagalan.

Lebih lanjut Sadjijono mengatakan keamanan masyarakat dalam rangka operasi kamtimas adalah suasana yang menciptakan pada individu manusia dan masyarakat perasaan-perasaan sebagai berikut:

1. Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis;
2. Adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan;
3. Perasaan dilindungi dari segala ancaman bahaya;
4. Perasaan kedamaian dan ketentraman lahirian dan batiniah.

Oleh sebab itu, sudah sewajarnya apabila untuk menciptakan keamanan dan ketertiban perlu melibatkan semua pihak, baik pihak pemerintah (kepolisian), pihak masyarakat, maupun pihak pengusaha (swasta). Hal lain yang tidak kalah penting dalam kehidupan manusia baik individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah persoalan Ketertiban yang adalah juga menjadi bagian dari tanggung jawab kepolisian adalah Ketertiban masyarakat. Ketertiban asal kata dasar “tertib” berarti teratur atau tertata, ketertiban mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada (Sadjijono *et.al.* 2008:72). Ketertiban dimaksud terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak ada penyimpangan berarti tertib.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Dirjosisworo (dalam Sadjinono, *et.al* 2008) ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Dengan demikian ketertiban merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidupnya. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat yang di dalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.

Dari pengertian-pengertian tentang keamanan dan ketertiban yang telah dijelaskan secara terpisah diatas dan apabila keduanya digabungkan menjadi keamanan dan ketertiban masyarakat maka akan mengandung pengertian yang lebih penting seperti menurut pengertian dalam Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, menyebutkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, menceah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keamanan masyarakat merupakan suatu kondisi dimana masyarakat terbebas dari ancaman,

gangguan, ketakutan dan resiko bahaya yang dapat menimbulkan kekerasan masyarakat baik secara lahiriah maupun batiniah. Kondisi inilah yang menjadi target tugas kepolisian sebagai fungsi maupun lembaga. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa layanan keamanan dan ketertibnan masyarakat oleh polisi kepada masyarakat ada dua yaitu disatu pihak untuk mencapai ketertiban (order) melalui tindakan prefentif dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktifitasnya. dan di pihak lain untuk melaksanakan hukum (*law*) melalui tindakan represif dalam wujud penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang.

c. Standar Kepolisian yang Baik (*Good Police Standard*)

Secara umum tugas-tugas polisi sangatlah mulia dan baik, akan tetapi tugas tersebut akan menjadi sebaliknya apabila pelaksanaannya tidak mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat baik norma hukum, kesopanan, sosial dan agama. Fungsi Kepolisian yang menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat tertuju pada pemeliharaan dan menjaga tetap berlakunya dan ditaatinya norma-norma yang ada di masyarakat tersebut, sehingga kehidupan dalam masyarakat menjadi aman, tertib, tentram, damai dan sejahtera. Apabila dicermati bahwa tugas kepolisian di ngara manapun penyelenggaraannya

tertuju pada kepentingan negara atau pemerintah dan masyarakat, sehingga negara atau pemerintahlah yang memiliki tanggung jawab atas terjaganya, terbinanya dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Tugas-tugas kepolisian dimaksud oleh Sadjijono, *et. al* (2005, 233) akan terselenggara dengan baik, apabila dijalankan oleh kepolisian yang berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya yang meliputi;

1. Orientasi pada fungsi kepolisian yang ideal, artinya tugas-tugas kepolisian diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat aman dan tertib. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan berpedoman pada asas-asas:
2. Legitimasi, artinya dalam menjalankan tugas kepolisian mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
3. Orientasi pada lembaga kepolisian yang berfungsi secara ideal, yakni secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan dibentuknya lembaga kepolisian yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pegayoman dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Di bagian lain, Sadjijono mengatakan tugas kepolisian terutama dalam rangka penegakkan hukum harus memperhatikan asas-asas yang melekat dalam fungsi kepolisian, antara lain:

1. Asas Legalitas; yaitu segala tindakan kepolisian yang dilakukan harus berdasarkan atas hukum atau kuasa Undang-undang.
2. Asas Kewajiban; yaitu apa yang dilakukan oleh kepolisian karena melekat kewajibannya yang diemban, sehingga dalam menyelenggarakan tugasnya dengan penuh keiklasan, penuh dedikasi tanpa adanya pamrih semata-mata untuk kepentingan tugas.
3. Asas Partisipasi; yaitu tindakan yang dilakukan kepolisian diusahakan mendapat dukungan atau partisipasi dari masyarakat, karena tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian tidak akan dapat terwujud sesuai harapan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat, yakni dalam bentuk komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan polisi yang mandiri , profesional dan memenuhi harapan masyarakat.
4. Asas Preventif; yaitu tindakan kepolisian lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan dan,
5. Asas Subsidiaritas: yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian mengadakan bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bersifat fungsional.

Di negara manapun di dunia, masyarakatnya menginginkan memiliki kepolisian yang baik, artinya di dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, sehingga

dibutuhkan adanya syarat kepolisian yang ideal. Menurut Atmasasmita (2001:192-193) di dalam membentuk kepolisian yang ideal dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang dilayani ada beberapa syarat dan rumusan yang telah disepakati dunia antara lain:

1. *Well Motivated*; artinya untuk mendapatkan mutu polisi yang baik seorang calon kadet polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika seorang calon polisi menjatuhkan pilihannya untuk menjadi polisi. Motivasi inilah yang akan ikut memberi warna pemolisian seorang polisi dalam mengembangkan kariernya, dan ini dipantau sejak dari awal rekrutmentnya.
2. *Well educated*; artinya untuk mendapatkan calon polisi yang baik harus dididik untuk menjadi polisi yang baik. Hal ini menyangkut sistem pendidikan, kurikulum dan proses belajar mengajar yang cukup rumit dan kompleks.
3. *Well trained*; artinya untuk memperoleh polisi yang baik perlu adanya pelatihan yang dengan melalui proses manajerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian aktual dan tantangan di masa depan.
4. *Well Equipment*; hal ini menyangkut masalah peralatan kepolisian yang meliputi sarana dan prasarana serta teknologi kepolisian.
5. *Welfare*; yakni dibutuhkannya kesejahteraan prajurit Polisi yang cukup memadai.

Oleh karena kepolisian di setiap negara dihadapkan pada kultur, idiologi bangsa dan karakteristik masyarakat yang berbeda maka disamping lima rumusan kepolisian yang ideal menurut Sadjijono, *et.al.* (2005:236-237) perlu adanya penambahan terutama yang berkaitan dengan pengorganisasian kepolisian dan pengawasan. Hal ini sangat berpengaruh dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya yang sangat ditentukan oleh eksistensi kepolisian dalam organisasi, sehingga mutu kepolisian yang ideal meliputi:

1. Motivasi dan moralitas yang baik dari calon anggota polisi dan anggota polisi, hal ini ditelusuri sejak rekrutmen calon hingga dinas kepolisian.
2. Dasar pendidikan umum dan pendidikan kepolisian yang memadai, dasar pendidikan umum yang berorientasi pada relefansi kebutuhan tugas, sedangkan pendidikan kepolisian harus sesuai dengan kurikulum yang berorientasi pada tugas dan tantangan tugas di masa mendatang.
3. Melakukan pelatihan secara rutin dan berkelanjutan.
4. Memiliki dan mampu menggunakan peralatan yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi dan masyarakat.
5. Pemberian kesejahteraan yang cukup berdasarkan kebutuhan normal dalam masyarakat yang berorientasi pada gradasi golongan kepangkatan dan masa berdinas.

6. Pengorganisasian yang efektif berorientasi pada tugas dan wewenang dan struktur ketatanegaraan untuk mewujudkan kepolisian yang benar-benar mandiri.
7. Adanya pengawasan yang baik dalam sistem organisasi.

Berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, disamping mutu kepolisian yang ideal sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena baik dan tidaknya polisi dalam arti sebagai fungsi atau tugas maupun lembaga, juga ditentukan oleh sumber daya manusia, sistem organisasi serta sarana dan prasarana, maka ketiga kebutuhan harus seimbang (*balance*). Dengan demikian untuk mewujudkan kepolisian yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat yang dilayani maka ketiga kebutuhan di atas dengan standar yang baik atau ideal menurut Sadjijono (*et.al.* 237) adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia.
 - a. Setiap anggota kepolisian harus memiliki moral yang baik (bersikap jujur, benar dan adil), bertaqwa kepada tuhan yang maha esa.
 - b. Memahami dan menjiwai doktrin-doktrin kepolisian.
 - c. Memiliki dedikasi, tanggungjawab dan kesadaran akan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan masyarakat.
 - d. Memiliki pengetahuan dan kemampuan profesional kepolisian.
 - e. Bekerja atas dasar kewajiban.
 - f. Mengindahkan norma-norma dalam masyarakat (agama, kesopanan, sosial dan hukum).

- g. Bersikap ramah dan sopan tidak otoriter dan kejam.
- h. Patuh dan taat kepada hukum.
- i. Bersikap impresial dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- j. Kesadaran belajar dan berlatih untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam menghadapi tantangan kedepan.
- k. Menjunjung tinggi dan menjaga budaya dn moral bangsa serta adat istiadat masyarakat yang ada.

2. Sistem Organisasi

- a. Organisasi dengan struktur yang efektif dan efisien (miskin struktur gaya fungsi).
- b. Memperbesar dan mengefektifkan sistem pengawasan.
- c. Memperluas peluang belajar dan berlatih bagi anggota.
- d. Efektifitas pemberian reward dan punishment.
- e. Pembagian bidang tugas dan wewenang yang jelas.
- f. Efektifitas kerja sama antar bidang.
- g. Pertanggungjawaban tugas dan wewenang secara berjenjang.
- h. Kesejahteraan personil yang layak dan memadai.

3. Sarana dan Prasarana

- a. Jumlah dan efektifitas memadai.
- b. Disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan teknologi.
- c. Dapat difungsikan sesuai kebutuhan.
- d. Pemeliharaan dan perawatan yang cukup.

B. Studi Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan dengan topik relevan terhadap penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut diuraikan sebagaimana berikut.

1. Muhammad (2003) melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Polri Pasca Polri Mandiri”. Informasi tentang kinerja dan faktor-faktor pendorong serta penghambat kinerja Polri Pasca Polri mandiri yang dapat dijadikan bahan bagi pembenahan sistem dan metode serta peningkatan piranti kerja Polri dalam upaya mewujudkan Polri mandiri yang profesional. faktor pendorong/penghambat peningkatan kinerja Polri adalah pemahaman personel tentang paradigma baru dan peranan atasan (langsung). Kinerja Polri ternyata menurut versi responden dalam penelitian PTIK, sangat didorong (dan sebaliknya sangat dihambat) oleh keteladanan, keharmonisan iklim kerja. Keketatan dan konsistensi pengawasan dan pemberian motivasi termasuk ganjaran dan hukuman (reward and punishment). Kesemuanya bersumber dari atasan langsung yang berperan dalam pekerjaan manajerial mulai dari yang terendah sampai tertinggi.
2. Febrianti dan Maulana (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Masyarakat pada Kinerja Kepolisian Terhadap Kepercayaan pada Kepolisian”. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini diketahui bahwa jumlah masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap kepolisian lebih banyak daripada masyarakat yang memiliki persepsi positif.

Kepercayaan masyarakat pada kepolisian berdasarkan penelitian ini berada pada tingkatan kepercayaan.

3. Wahyurudhanto (2018) melakukan penelitian dengan judul “Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Polri”. Kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengalaman langsung masyarakat ketika berhubungan dengan Polri, media, dan informasi tentang pengalaman pihak lain ketika berhubungan dengan Polri. Sehingga dipandang perlu untuk mengidentifikasi kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat terhadap kinerja Polri. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat dilakukan secara profesional sehingga dapat mengoptimalkan kinerja Polri guna melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat; memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum. Untuk itu dilakukan penelitian yang berkesinambungan, terintegrasi, sistemik dan sistematis untuk mengidentifikasi kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri agar Polri dapat memperbaiki dan mempertahankan kinerja positif untuk mewujudkan layanan prima kepolisian.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat beberapa penelitian dengan topik yang relevan terhadap penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut juga memiliki topik yang berkaitan dengan kinerja kepolisian. Namun demikian, ada perbedaan yang mendasar antara penelitian-penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian terdahulu melakukan pengukuran terhadap kinerja personil kepolisian, namun peneliti melakukan penelitian terkait

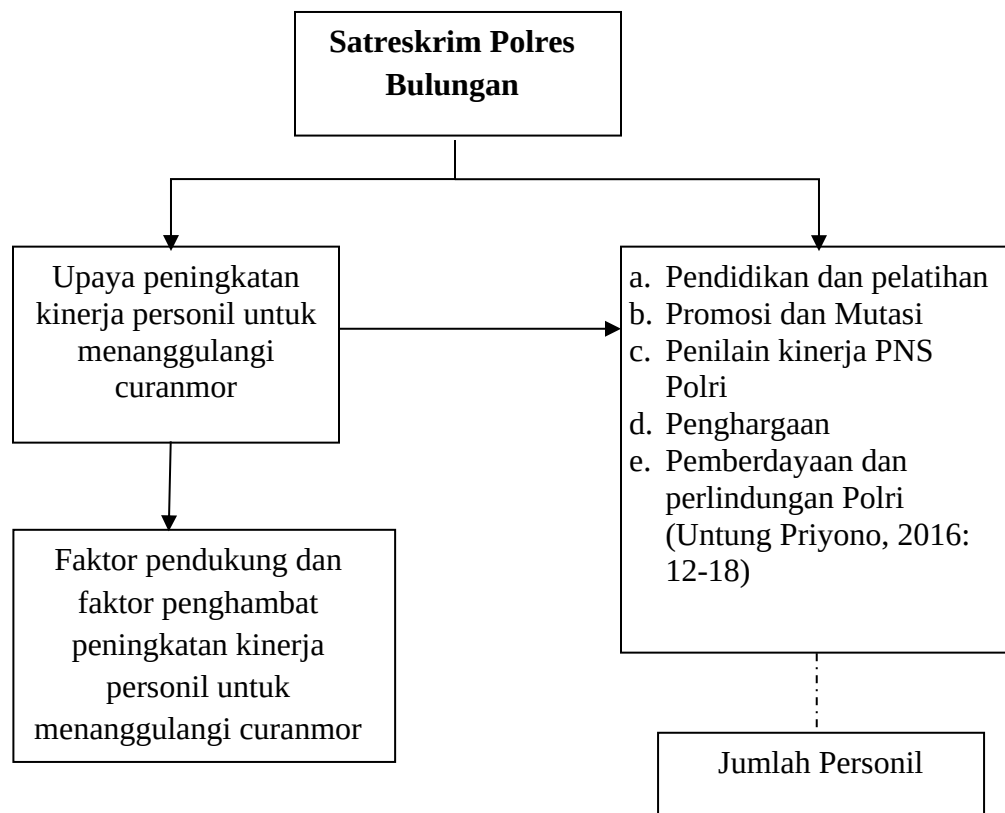
dengan upaya peningkatan kinerja kepolisian. Selain itu, beberapa peneliti terdahulu juga mengukur kinerja kepolisian berdasarkan persepsi masyarakat, namun peneliti melakukan penelitian terkait dengan upaya yang dilakukan kepolisian, yang diungkap berdasarkan persepsi dari unit kepolisian sendiri. Dengan adanya perbedaan tersebut maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

C. Alur Pikir

Meskipun Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Bulungan sudah memiliki kinerja yang cukup baik dalam menangani tindak kriminal tersebut, namun kinerja personil juga harus selalu ditingkatkan. Dalam rangka peningkatan kinerja Polres terdapat 6 unsur yang sangat menentukan yaitu:

1. Pendidikan dan pelatihan, pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Polres dalam peningkatan kinerja personil. Pendidikan dan pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan Polres dalam menangani curanmor.
2. Pangkat dan jabatan, diberikan kepada personil Satreskrim dengan tujuan memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja.
3. Promosi dan mutasi, dilakukan dalam peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) supaya personil berlomba-lomba untuk memajukan diri untuk berkembang.
4. Penilaian kinerja, dilakukan bagian dari evaluasi kinerja untuk mengetahui tingkat kelemahan dan kemampuan supaya dapat dikembangkan.

5. Penghargaan, diberikan supaya personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) merasa diperhatikan dengan kinerjanya yang dihasilkan.
6. Pemberdayaan dan perlindungan dilakukan untuk meningkatkan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim), personil diajak bersama untuk bekerja sehingga menamba wawasan dan pengetahuan.



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dilaksanakan untuk memaparkan situasi atau peristiwa yang terjadi sesungguhnya. Penulisan ini tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menjelaskan situasi atau peristiwa, tidak mencari hubungan sebab akibat, membuat uji hipotesis atau membuat prediksi.

Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja personil Satremkrim. Penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri pokok. Ciri-ciri pokok dari metode deskriptif adalah: (1) memusatkan perhatian-perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual, dan (2) menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional yang adekuat.

B. Penetapan Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai perilaku peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan.

Penelitian dilaksanakan dalam suatu kurun waktu. Kurun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dari bulan Januari sampai dengan April 2020.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif ditujukan untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penelitian berjalan terarah mencapai tujuannya. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan.
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan.

D. Pemilihan Informan

Unit analisis dalam penelitian ini terdiri dari seluruh personil dalam satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan. Dari unit analisis tersebut diambil sebuah sampel. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling, dimana peneliti mengambil orang-orang yang terpilih karena sesuai dengan tujuan penelitian. Orang-orang yang dijadikan informan diantaranya sebagai berikut.

1. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan,
2. Personil Satrekrim Polres Bulungan sebanyak
3. Warga Masyarakat Kabupaten Bulungan

E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain sebagaimana berikut.

1. Studi pustaka, yaitu dengan membaca dan mencari buku-buku, majalah dan surat kabar yang berhubungan dengan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan.
2. Studi lapangan, yaitu dengan mengamati dan terjun langsung ke Kantor Kepolisian Resor Bulungan untuk mengetahui tentang kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut.
 - a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung permasalahan yang ada di Satreskrim Kabupaten Bulungan tentang kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan.
 - b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti/pewawancara kepada informan penelitian, dan jawaban-jawaban tersebut dicatat atau direkam dengan alat perekam (tape recorder).
 - c. Studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian dalam hal ini personil kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan. Studi dokumentasi disini berupa buku harian, laporan, dan notulen rapat.

F. Teknik Analisis Data

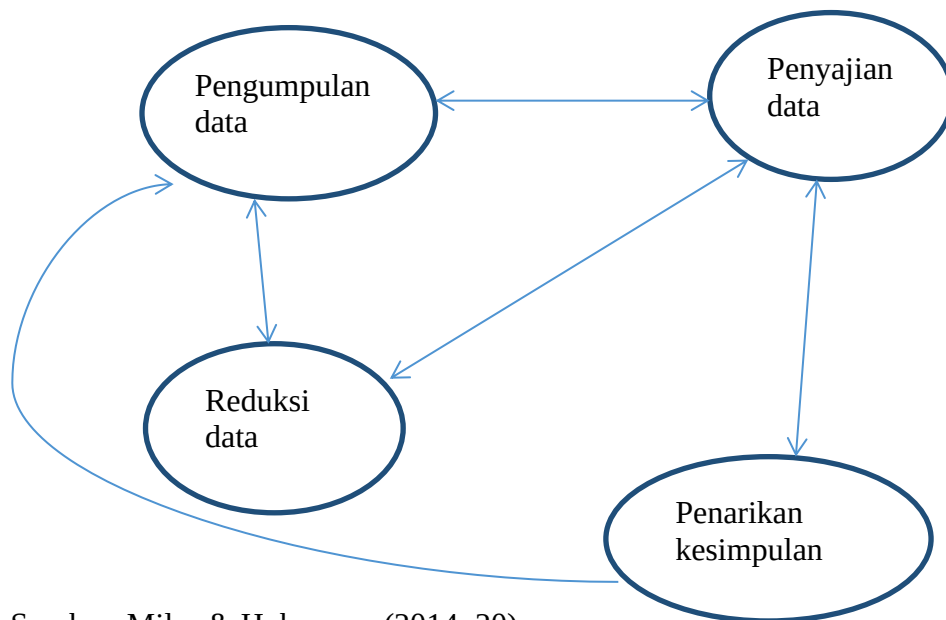
Secara operasional, teknik pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana model teknik analisis data yang dikemukakan Miles dan Huberman (2009: 15-20). Pertama, reduksi data sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dari hasil penggunaan teknik dan alat pengumpulan data di lapangan. Reduksi data sudah dilakukan semenjak pengumpulan data. Reduksi dilaksanakan secara bertahap dengan cara membuat ringkasan data dan menelusuri tema yang tersebar. Setiap data yang dipilih disilang melalui komentar informan yang berbeda untuk menggali informasi dalam wawancara dan observasi. Informasi yang berasal dari tokoh-tokoh dalam struktur organisasi Satreskrim Kepolisian Kabupaten Bulungan disilangkan dengan informasi yang diperoleh dari personil.

Kedua, penyajian data merupakan suatu upaya penyusunan sekumpulan informasi menjadi pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang pada mulanya terpecah dan terpisah menurut sumber informasi dan pada saat diperolehnya informasi tersebut. Kemudian, data diklasifikasikan menurut pokok-pokok permasalahan yang antara lain terkait dengan peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan. Ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan reduksi, interpretasi dan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya selaras dengan mekanisme logika pemikiran induktif, maka penarikan kesimpulan

akan bertolak dengan hal-hal yang khusus (spesifik) sampai kepada rumusan simpulan yang sifatnya umum (general).

Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisa data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan untuk memberikan penafsiran, pemilahan dan perkaitan konfirmasi antara data atau fenomena satu dan lainnya dalam mendeksripsikan permasalahan yang diteliti. .

Analisis deskriptif kualitatif pada penelitian ini dilakukan berdasarkan metode analisis data model Miles dan Huberman. Miles & Huberman (2009: 73) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Alur pengolahan data dimaksud dapat dilihat pada Gambar 3.1



Sumber: Miles & Huberman (2014: 20)

Gambar 3.2 Komponen Analisis Data Model Interaktif

Aktivitas dalam analisis data kualitatif diuraikan sebagai berikut.

1. Data Reduction

Reduksi data dilakukan dengan merangkum data yang telah dikumpulkan di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan pola yang sesuai dengan topik dan menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan analisis.

1. Data Display

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplay atau menyajikan data. Display data dilakukan dengan membahas data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini, penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori. Penyajian data akan memberikan pemahaman terhadap data yang diperoleh sehingga dapat melakukan langkah selanjutnya berdasarkan data yang telah dipahami tersebut.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah selanjutnya dalam analisis kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil temuan mengenai fakta lapangan yang diperoleh melalui proses reduksi dan penyajian data. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal ini tentunya juga didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten sehingga dapat dihasilkan kesimpulan akhir yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Polres Bulungan

Sebelum tahun 1989 di Kabupaten Bulungan yang berkedudukan di Tanjung selor sudah ada Polres Bulungan yang berkedudukan di Tarakan, sedangkan kantor Bupati Bulungan, DPR sudah ada berkedudukan di Tanjung Selor, sedangkan kantor Kepolisian yang ada hanya Polsektif Tanjung Selor, sedangkan Polres Bulungan yang berkedudukan di Tarakan merupakan kota administratif Tarakan adalah bagian dari Kabupaten Bulungan. waktu itu Polres Bulungan yang berkedudukan di Tarakan membawahi 15 Polsek :

- a. Polsek Tarakan Timur di Kampung Empat
- b. Polsek Bunyu di Pulau Bunyu
- c. Polsek Nunukan di Pulau Nunukan
- d. Polsek Sei Nyamuk di Pulau sebatik
- e. Polsek Sebuku di Pembeliangan
- f. Polsek Sembakung di Desa Atap
- g. Polsek Lumbis di Mensalong
- h. Polsek Krayan di Long Bawan
- i. Polsek Malinau di Malinau Kota
- j. Polsek Mentarang di Pulau Sapi

- k. Polsek Kayan Hulu di Long Nawang
- l. Polsek Long Pujungan di Long Pujungan
- m. Polsek Tanjung Selor di Tanjung Selor
- n. Polsek Sesayap di Tideng Pale
- o. Polsek Long Peso di Long Bia

Pada tahun 1989 terbentuk Polres Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Selor dan Polres Tarakan berkedudukan di kota administratif Tarakan, dari alih kodal dengan Polres tarakan Polres Bulungan membawahi 10 Polsek :

- a. Polsek Sembakung di Desa Atap
- b. Polsek Lumbis di Mensalong
- c. Polsek Krayan di Long Bawan
- d. Polsek Malinau di Malinau Kota
- e. Polsek Mentarang di Pulau Sapi
- f. Polsek Kayan Hulu di Long Nawang
- g. Polsek Long Pujungan di Long Pujungan
- h. Polsek Tanjung Selor di Tanjung Selor
- i. Polsek Sesayap di Tideng Pale
- j. Polsek Long Peso di Long Bia.

Sedangkan Polres Tarakan membawahi 5 Polsek :

- a. Polsek Tarakan Timur di Kampung Empat
- b. Polsek Bunyu di Pulau Bunyu

- c. Polsek Nunukan di Pulau Nunukan
- d. Polsek Sei Nyamuk di Pulau Sebatik
- e. Polsek Sebuku di Pembeliangan.

Pada tanggal 29 Maret 1999 diwilayah hukum Polres Bulungan telah terbentuk Polsek Sekatak karena pemekaran kecamatan di Kabupaten Bulungan. Pada tahun 2000 Polsek Bunyu diserahkan wilayahnya ke Polres Bulungan karena kota administratif Tarakan berubah status menjadi Kotamadya Tarakan.

Pada tahun 2002 Kecamatan Malinau berubah menjadi Kabupaten Malinau dan Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep / 29 / IX / 2002 tanggal tanggal 23 September 2002 tentang pembentukan Polres Malinau Polda Kalimantan Timur. Pada tanggal 23 Maret 2003 telah dilaksanakan alih kodal dengan Polres Malinau yang membawahi 4 Polsek :

- a. Polsek Malinau di Malinau kota
- b. Polsek Mentarang di Pulau Sapi
- c. Polsek kayan hulu di Long nawang
- d. Polsek Long Pujungan di Long Pujungan.

Polres Bulungan membawahi 5 Polsek :

- a. Polsek Tanjung Selor di Tanjung Selor
- b. Polsek Sesayap di Tidung Pala
- c. Polsek Long Peso di Long bia

- d. Polsek Sekatak terbentuk (Polsek pengembangan) 29 Maret 1999
- e. Polsek Bunyu (alih kodan dari Polres tarakan) 01 Januari 2000.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep / 30 / IX / 2002 tanggal 23 September 2002 tentang pembentukan Polres Nunukan Polda Kalimantan Timur. Pada tanggal 23 Maret 2003 telah dilaksanakan alih Kodan membawahi :

- a. Polsek Nunukan di Pulau Nunukan.
- b. Polsek Sei Nyamuk di Pulau Sebatik.
- c. Polsek Sebuku di Pembeliangan.
- d. Polsek Sembakung di Desa Atap.
- e. Polsek Lumbis di Mensalong.
- f. Polsek Krayan di Long Bawan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kaltim tanggal 30 Juli 2007 telah terbentuk 4 Polsek Persiapan :

- a. Polsek Persiapan Tanjung Palas Timur Polres Bulungan No. Pol. : Skep / 219 / VII / 2007 tanggal 30 Juli 2007 yang berkedudukan di Tanah Kuning
- b. Polsek Persiapan Tanjung Palas Utara Polres Bulungan No. Pol. : Skep / 217 / VII / 2007 tanggal 30 Juli 2007 Yang berkedudukan di Pimping.

c. Polsek Persiapan Tanjung Palas Barat Polres Bulungan No. Pol. :
Skep / 218 / VII /2007 tanggal 30 Juli 2007 yang berkedudukan di
Long Beluah.

d. Polsek Persiapan Tanah Lia No. Pol. : Skep / 220 / VII / 2007
tanggal 30 Juli 2007 yang berkedudukan di Tanah Merah.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Kaltim tanggal 11 Juni 2008
telah terbentuk 3 Polpol di jajaran Polres Bulungan :

a. Pospol Peso Hilir Polres Bulungan No. Pol. : Skep / 99 / VI / 2008
tanggal 11 Juni 2008 yang berkedudukan di Long Tugu.

b. Pospol Tanjung Selor Polres Bulungan No. Pol. : Skep / 100 / VI /
2008 tanggal 11 Juni 2008 yang berkedudukan di Tanjung Selor Hilir

c. Pospol Tanjung Palas Tengah Polres Bulungan No. Pol. : Skep / 101 /
VI / 2008 tanggal 11 Juni 2008 yang berkedudukan di Salimbatu.

Sehingga Polres Bulungan sampai dengan tahun 2008 membawahi 9
Polsek dan 3 Pospol :

a. Polsek Tanjung Selor di Tanjung Selor

b. Polsek Sesayap di Tideng Pale

c. Polsek Long Peso di Long Bia

d. Polsek Sekatak terbentuk (Polsek pengembangan) 29 Maret 1999

e. Polsek Bunyu (alih kodan dari Polres tarakan) 01 Januari 2000

f. Polsek persiapan Tanjung Palas Timur di Tanah Kuning

g. Polsek persiapan Tanjung Palas Utara di Pimping

- h. Polsek persiapan Tanjung Palas Barat di Long Beluah
- i. Polsek persiapan Tanah Lia di Tanah Merah
- j. Pospol Peso Hilir Long Tunggu
- k. Polpol Tanjung Selor
- l. Pospol Tanjung Palas Tengah di Salimbatu.

Bangunan Polsek yang di hibahkan oleh Bupati Bulungan H. Anang Dachlan Djauhari kepada Kapolres Bulungan AKBP Aton Suhartono dengan Berita Acara Penyerahan Bangunan Nomor : 640/309/UM-PLK/XI/2004 tanggal 10 Nopember 2004 :

- a. Polsek Persiapan Tanjung Palas Timur di Tanah Kuning.
- b. Polsek Persiapan Tanjung Palas Utara di Pimping.
- c. Polsek Persiapan Tanjung Palas Barat di Long Beluah.
- d. Polsek Persiapan Tanah Lia di Tanah Merah.

Bangunan Polsek yang di hibahkan oleh Bupati Bulungan H. Budiman Arifin kepada Kapolres Bulungan AKBP Purnama Barus :

- a. Pospol Peso Hilir di Long Tunggu berita acara penyerahan nomor 028/31/UM-PLK/PLK/I/2008 tanggal 16 Januari 2008
- b. Pospol Tanjung Selor di Tanjung Selor Hilir berita acara penyerahan nomor 028/31/UM-PLK/PLK/I/2008 tanggal 16 Januari 2008
- c. Pospol Tanjung Palas Tengah di Salimbatu berita acara penyerahan nomor 028/30/UM-PLK/PLK/I/2008 tanggal 16 Januari 2008.

Waktu terbentuknya Polres Bulungan Mako Polres belum ada sementara waktu memakai bangunan Kantor Polsektif Tanjung Selor. karena bangunan Polsektif Tanjung Selor dipakai sebagai kantor Mapolres Bulungan, maka kedudukan Kantor Polsektif Tanjung Selor dialihkan ke Tanjung Palas. Kapolres yang pertama menjabat di Kabupaten Bulungan adalah Letkol Pol Dhany Sujoko.

Bangunan Mapolres baru dibuat dan peresmian pemakaian gedung Mapolres Bulungan oleh Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Kolonel Polisi Drs. Soediyono Pada tanggal 9 juli 1990 Berkedudukan di Jalan Agatis No. 4 Tanjung selor.

2. Nama Kapolres Bulungan Tahun 1989-2021

Berikutini merupakan data tentang Kapolres Bulungan dari tahun ketahun semenjak Tahun 1989-2021.

Tabel 4.1 Nama Kapolres Bulungan Tahun 1989-2021

No	Nama Pejabat	Tahun Menjabat	Keterangan
1	Letkol Pol Drs. Dhany Sujoko	20-02-1989 S/D 30-06-1991	Kolonel (Purn)
2	Letkol Pol Drs. Suharto	30-06-1991 S/D 27-06-1992	Kolonel (Purn)
3	Letkol Pol Drs. Heroejono. As	27-06-1992 S/D 12-10-1994	Almarhum
4	Letkol Pol Drs. M. Hidayat	12-10-1994 S/D 08-12-1997	Kolonel (Purn)
5	Letkol Pol Drs. Manay Syam	08-12-1997 S/D 12-01-2000	Kolonel (Purn)
6	Letkol Pol Drs. James Umboh	12-01-2000 S/D 08-12-2001	Kolonel (Purn)
7	Akbp Drs. Heru Sulistiono	08-12-2001 S/D 26-03-2003	Kombes (Purn)
8	Akbp Drs. Erwin Triwanto, S.H	26-03-2003 S/D 07-05-2004	Irjen (Purn)
9	Akbp Drs. Aton Suhartono	07-05-2004 S/D 19-12-2005	Kombes (Purn)
10	Akbp Drs. Hendi Handoko	19-12-2005 S/D 27-09-2006	Brigjen (Purn)
11	Akbp Drs. M. Arkan Hamzah	27-09-2006 S/D 27-12-2007	Irjen (Purn)
12	Akbp Purnama Barus	27-12-2007 S/D 17-10-2009	Kombes Pol

13	Akbp Endro Prasetyo, S.Ik	17-10-2009 S/D 01-04-2011	Kombes Pol
14	Akbp Hari Nugroho, S.Ik	05-04-2011 S/D 03-06-2013	Kombes Pol
15	Akbp Turmudi, S.I.K	03-06-2013 S/D 22-08-2014	Kombes Pol
16	Akbp Eka Wahyudianta, S.Ik, M.Si	22-08-2014 S/D 19-09-2015	Kombes Pol
17	Akbp Ahmad Sulaiman, S.I.K, M.H	19-09-2015 S/D 28-04-2017	Kombes Pol
18	Akbp Muhammad F, S.H, S.I.K, M.Si	28-04-2017 S/D 14-10-2018	Kombes Pol
19	Akbp Andrias Susanto N, S.I.K, M.Si	14-10-2018 S/D 07-11-2019	Akbp
20	Akbp Yudhistira M, S.H, S.I.K, M.Si	07-11-2019 S/D 01-05-2020	Akbp
21	Akbp Teguh Triwantoro, S.I.K., M.H.	01-05-2020 S/D 26-07-2021	Akbp
22	Akbp Ronaldo M T.P.P. Siregar, S.H., S.I.K	26-07-2021 S/D Sekarang	Akbp

Sumber : Kantor Kapolres Bulungan 2021

3. Data Personel Polres Bulungan 22 November 2021 Perpol Nomor 2 Tahun 2021

Adapun Data Personel Polres Bulungan 22 November 2021 Perpol

Nomor 2 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Data Personel Polres Bulungan Tahun 2021

NO	FUNGSI	DSP	RIIL
1	KA / WAKA	2	2
2	BAG OPS	23	11
3	BAG REN	17	7
4	BAG SDM	14	18
5	BAG LOG	10	8
6	SIWAS	8	3
7	SIPROPAM	17	7
8	SIHUMAS	5	4
9	SIKUM	5	2
10	SITIK	8	3
11	SIUM	13	5
12	SPKT	13	6
13	SAT INTELKAM	53	23
14	SAT RESKRIM	67	32
15	SAT RESNARKOBA	26	20
16	SAT BINMAS	24	9

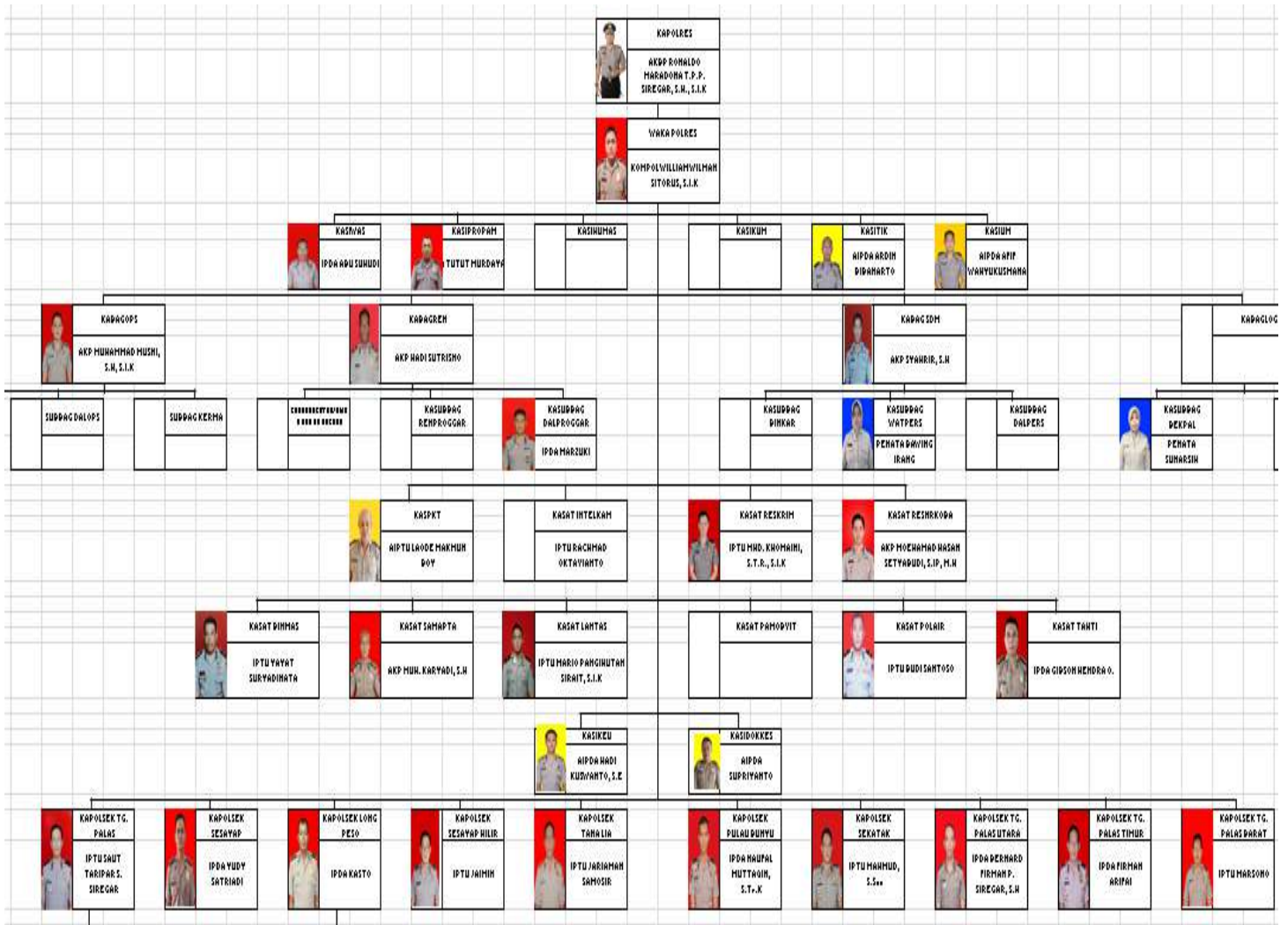
17	SAT SABHARA	122	39
18	SAT LANTAS	88	31
19	SAT TAHTI	8	5
20	SAT POLAIR	34	9
21	SIKEU	9	5
22	SIDOKKES	8	8
	JUMLAH	574	257

NO	POLSEK	DSP	RIIL
1	POLSEK TG. PALAS	52	19
2	POLSEK LONG PESO	52	12
3	POLSEK SESAYAP	52	20
4	POLSEK SEKATAK	52	13
5	POLSEK BUNYU	52	14
6	POLSEK TG. PALAS UTARA	52	13
7	POLSEK TG. PALAS TIMUR	52	12
8	POLSEK TG. PALAS BARAT	52	12
9	POLSEK TANAH LIA	52	11
10	POLSEK SESAYAP HILIR	30	13
	JUMLAH	498	139

NO	POLSUBSEKTOR	DSP	RIIL
1	POLSUBSEKTOR TG. SELOR	16	-
2	POLSUBSEKTOR TG. PALAS TENGAH	16	4
3	POLSUBSEKTOR PESO HILIR	16	2
	JUMLAH	48	6

Sumber : Kantor Kapolres Bulungan 2021

STRUKTUR ORGANISASI POLRES BULUNGAN



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polres Bulungan

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Berikut ini deskripsi hasil penelitian tentang upaya peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan dengan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim)

Dalam Menangani Curanmor Di Kabupaten Bulungan

Sebagai kepolisian yang memegang tegu kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugas, tentu sangat penting untuk meningkatkan kinerja. Adapun upaya peningkatan Kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Dalam Menangani Curanmor Di Kabupaten Bulungan yaitu:

a. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Demikian juga dengan Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Dalam Menangani Curanmor di Kabupaten Bulungan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja personil sangat penting diadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Adapun hasil wawancara dengan Brigpol Teguh Rifai Bamin SatReskrim Polres Bulungan bahwa :

Sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan yaitu melalui pendidikan dan

pelatihan . dimana pelatiha tersebut wajib diikuti oleh personil Satreskrim (Wawancara, 12/10/2021).

Demikian pendapat Hasil wawancara dengan Briptu Jerry Ananda Jabatan Bamin Sat Reskrim beliau berpendapat bahwa :

Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh personil Polres Bulungan selalu memperhatikan SOP yang ada, dan juga melakukan pelatihan untuk bekerja dengan baik. (Wawancara, 12/10/2021).

Untuk membentuk sosok personil Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) dalam menangani Curanmor di Kabupaten Bulungan yang dimaksudkan di atas, diperlukan Diklat yang mengarah pada : Peningkatan semangat dan pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air; peningkatan kinerja teknis, peningkatan efisiensi, efektifitas, kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab sesuai dengan kebutuhan.

Lebih lanjut wawancara dengan Briptu Rahdianur Bamin Sat Reskrim Polres Bulungan beliau menyampaikan bahwa :

Sangat terlatih dikarenakan selalu meningkatkan kinerja dengan cara mengikuti Diklat pelatihan mengenai kerja dan kinerja di lapangan. (Wawancara, 12/10/2021).

Kinerja personil Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) dalam menangani Curanmor di Kabupaten Bulungan tidak secara otomatis menjadi lebih baik Akan tetapi dapat terbentuk dari kegiatan-kegiatan pendidikan dan

pelatihan yang diikuti oleh personil. Pelatihan yang pernah diikuti oleh personil

Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) diantaranya yaitu :

1. Pelatihan Penyidikan T.P.KDRT/PPA/RPK fungsi reskrimum tahun 2018.
2. Dikbangpes Bintara Dasar Reskrim 2020.
3. Pelatihan prigadir pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka fungsi teknis reskrimum, tahun 2016.
4. Pelatihan brigadier penyidikan T.P. Korupsi fungsi reskrimsus, tahun 2017.

Ditegaskan dengan pendapat Kepala Satuan Reserse dan Kriminal
Polres Bukungan Bapak AKP BELNAS PALI PADANG, SE., S.I.K.

Kami mengikut pendidikan dan pelatihan sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja personil personil Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) dalam menangani pencurian motor di Kabupaten Bulungan. (Wawancara, 14/10/2021).

Pencurian motor di Kabupaten Bulungan terjadi akibat meningkatnya kebutuhan dan kurangnya pendapatan sehingga pencuri motor tertarik melakukan pencurian. Untuk menangani permasalahan pencurian motor di Kabupaten Bulungan maka peningkatan kinerja personil Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) sangat penting. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti dengan harapan yakni untuk mempersiapkan personil yang akan ditugaskan, dan memperbaiki kinerja lewat peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan personil.

Berikut ini hasil dokumentasi penelitian tentang pelatihan dan pendidikan yang diikuti oleh personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dalam upaya peningkatan kinerja.



Gambar 4.2 Sertifikat Pelatihan

Berdasarkan pada gambar tersebut di atas dapat diketahui bahwa kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dan diikuti merupakan bagian dari peningkatan kemampuan dalam bekerja. adapun nama pelatihan tersebut yaitu Pelatihan brigadir pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka fungsi teknis reskrimum, tahun 2016 dan Dikbangpes Bintara Dasar Reskrim 2020. Melalui kegiatan pelatihan tersebut, tentu personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) mendapatkan pemahaman baru dan pendidikan baru dalam menjalankan tugas yang lebih baik.

b. Promosi dan Mutasi

Keterbatasan sumber daya manusia yang berkompeten dibidang penyelidikan dan penyidikan di lingkungan Polri menjadi penyebabnya, maka dari itu pengembangan sistem peningkatan kompetensi personil di bidang Reserse Kriminal perlu menjadi perhatian terutama faktor kompetensi yang paling diperlukan dengan tujuan peningkatan kinerja. Sebagai upaya untuk peningkatan kompetensi dlam penyelidngkan pencurian motor, maka diadakan mutasi jabatan. Diaman mutasi tersebut dilakukan karena berdasarkan kemamuan yang dimiliki oleh personil.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak IPDA FAISAL ANANG SATRIA, S.Tr.K.s sebagai Kanit Jatanras Polres Bulungan, beliau mengatakan bahwa :

Salah satu upaya yang kami lakukan untuk peningkatan Kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) yaitu dengan adanya system promosi dan mutasi. Tetapi yang selama ini kami lakukan yaitu adanya kegiatan mutasi perosonil. (Wawancara, 14/10/2021).

Mutasi yang dilakukan harus didasarkan pada kompetensi dan pendidikan yang dimiliki. Mutasi dan promosi jabatan harus berdasarkan reward and punishment yang terukur. Tujuannya guna penyegaran dan perbaikan di tubuh Polri. Mutasi dilaksanakan dengan harapan supaya dapat meningkatkan kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Dalam Menangani Curanmor Di Kabupaten Bulungan.

Lebih lanjut wawancara dengan Brigpol Teguh Rifai Bamin SatReskrim Polres Bulungan menyamakan bahwa :

Kita mengadakan promosi serta mutasi karena hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Personil yang prestasi tentunya akan mendapatkan promosi dan mutasi yang lebih baik, tetapi personil yang tidak bekerja dengan baik, maka akan dimutasikan ke tempat kerja lain. (Wawancara, 12/10/2021).

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak dengan Bapak Cahya Ade Saputra bahwa :

Kita melakukan promosi dalam bentuk mutasi, dimana personil yang sudah mendapatkan pendidikan dan memiliki kinerja yang baik akan dimutasikan ke tempat yang lebih baik (Wawancara, 14/10/2021).

Salah satu sistem pembinaan karier personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) di Kabupaten Bulungan dilaksanakan melalui mutasi pada setiap jenjang kepangkatan secara rutin dan berdasarkan kebutuhan organisasi atau pertimbangan kepentingan individu Anggota sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.

c. Penilaian Kinerja Polri

Kegiatan penilaian kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan sendiri dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing personil dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja, sehingga dapat diambil tindakan yang efektif semisal pembinaan berkelanjutan maupun tindakan koreksi atau perbaikan atas pekerjaan yang dirasa kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan.

Adapun hasil wawancara dengan Briptu Jerry Ananda Jabatan Bamin Sat Reskrim berpendapat bahwa :

Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan sudah terlatih dikarenakan selalu meningkatkan kinerja dengan cara mengikuti Diklat pelatihan mengenai kerja dan kinerja di lapangan . dengan demikian kita tetap melakukan peniaian kinerja untuk mengukur ketercapaian kinerja personil (Wawancara, 12/10/2021).

Selanjutnya menurut Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bukungan Bapak AKP BELNAS PALI PADANG, SE., S.I.K. berpendapat bahwa :

Kami malakukan penilaian kinerja dengan harapan untuk memperbaiki kualitas kerja Penilian personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan. Penilaian tersebut tentu sangat bermanfaat bagi kami karena dengan demikian kami dapat mengetahui bagaimana dengan kinerja setiap personil di Satreskrim. (Wawancara, 14/10/2021).

Hasil wawancara dengan Bapak IPDA FAISAL ANANG SATRIA, S.Tr.K. sebagai Kanit Jatanras Polres Bulungan berpendapat :

Penilaian Penilian personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan dilakukan secara sistematis yaitu setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui hasil pekerjaan personil. (Wawancara, 14/10/2021).

Untuk mempertegas pedapat tersebt, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak IPDA FAISAL ANANG SATRIA, S.Tr.K. sebagai Kanit Jatanras Polres Bulungan berpendapat bahwa :

Upaya meningkatkan efektivitas kinerja dengan cara selalu memperhatikan dan mengevaluasi kinerja anggota di lapangan, dengan harapan efektif dalam melaksanakan atau menyelesaikan perkara curanmor tersebut dengan (Wawancara, 14/10/2021).

Penilaian kinerja terhadap personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan biasanya dilakukan oleh Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bulungan untuk memberikan penilaian personil. Peneilaian yang dilakukan mencakup kemampuan dalam menjalankan tugas, tingkat kehadiran dalam menjalankan tugas dan taat terhadap peraturan yang ditetapkan. Tujuan evaluasi kinerja yaitu untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi.

d. Penghargaan

Penghargaan salah satu poin terpenting cara meningkatkan kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan yang mudah namun efektif. Melalui sistem pemberian *reward*. Sebuah *reward* akan membuat Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) merasa dihargai atas kerja kerasnya. Apresiasi yang diperoleh jelas akan memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja.

Adapun hasil wawancara dengan Briptu Jerry Ananda Jabatan Bamin Sat Reskrim mengatakan bahwa :

Dalam upaya meningkatkan kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan tentu kita harus memberikan penghargaan atas prestasi yang ditunjukkan. (Wawancara, 12/10/2021).

Selajutnya hasil wawancara dengan Briptu Rahdianur Bamin Sat Reskrim Polres Bulungan yaitu :

Kita memberikan penghargaan kepada Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) ketika mereka mampu menjalankan tugas mereka dengan sangat baik. Kita juga memberikan *punishment* bagi personil yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka (Wawancara, 12/10/2021).

Penghargaan tersebut diberikan dikarenakan dalam menangani kasus curanmor tersebut personil SatReskrim tersebut bekerja dengan baik dan mampu bekerja dalam Tim dan selalu mengevaluasi kinerja di lapangan. Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh personil Polres Bulungan selalu memperhatikan SOP yang ada, dan melakukan pelatihan untuk bekerja dengan baik.

Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bukungan Bapak AKP BELNAS PALI PADANG, SE., S.I.K. berpendapat bahwa :

Penghargaan sangat penting diberikan untuk meningkatkan kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) karena mereka akan merasa dihargai dan lebih semangat dalam bekerja. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk sertifikat dan uang pembianan, dan ada dalam bentuk pujian diumumkan kepada personil kepolisian (Wawancara, 14/10/2021).

Penghargaan atau Reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar Personil Satuan Reserse Dan Kriminal menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Pemberian reward dimaksudkan sebagai dorongan agar Personil

Satuan Reserse Dan Kriminal mau bekerja dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam menangani pencurian motor.

Selain penghargaan, ada juga punishment yang diberikan kepada Personil Satuan Reserse Dan Kriminal, karena akan ada keteraturan dalam membentuk dan menjalankan tugas dengan disiplin yang kuat dan tanggung jawab yang tinggi untuk menciptakan kepribadian yang baik. Fungsi punishment ditetapkan yaitu: 1. Punishment menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak baik. 2. Bersifat mendidik. 3. Memperkuat motivasi.

Berikut hasil penelitian dalam bentuk dokumentasi tentang penghargaan kepada Personil Satuan Reserse Dan Kriminal yang mendapatkan penghargaan.



Gambar 4.3 Piagam Penghargaan

Dari gambar 4.3 merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti melalui teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih valid. Dari gambar tersebut dapat peneliti jelaskan bahwa, penghargaan diberikan kepada Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) sebagai wujud kepedulian atas capaian yang diperoleh yaitu mampu menangkap tersangka pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polsek Pulau Bunyu yang diduga kuat telah melarikan diri dari rumah tahanan Polsek Pulau Bunyu. Penghargaan yang diberikan tentu akan berdampak kepada motivasi kerjakarena mendapatkan pujian dan penghargaan secara khusus.

e. Pemberdayaan dan perlindungan Polri

Pemberdayaan Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) yaitu upaya untuk membangun kemampuan dalam bekerja sama, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan dan perlindungan dilakukan terhadap Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dengan harapan dapat meningkatkan kinerja. Pemberdayaan dan perlindungan yang ada berupa fasilitas dan perlengkapan dalam menjalankan tugas untuk menangani pencurian motor tentu dapat meningkatkan kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim). Dengan perlindungan yang ada, personil tentu akan merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan tugas.

Adapun hasil wawancara dengan Brigpol Teguh Rifai Bamin SatReskrim Polres Bulungan berpendapat bahwa :

Pemberdayaan yang kami lakukan yaitu dengan mengajak berpartisipasi dalam kegiatan dan membagikan jadwal tugas. Dengan adanya jadwal yang ditetapkan, maka Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) akan lebih bertanggung jawab (Wawancara, 12/10/2021).

Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dapat bekerja efektif, karena mereka dalam menangani kasus curanmor baik penyidik dan anggota lapangan dapat bekerja sama dengan baik. Melalui kerja sama yang baik, penanganan curanmor akan lebih efektif. Untuk lebih efektifnya , kasus curanmor yang terjadi di Kabupaten Bulungan, Polres Bulungan perlunya ada kinerja dan kerja sama dengan pihak kepolisian, dan masyarakat dalam menangani atau memberantas pelaku curanmor tersebut.

Demikian hasil wawancara dengan Briptu Rahdianur Bamin Sat Reskrim Polres Bulungan berpendapat :

Pemberdayaan dan perlindungan kita berikan dengan harapan meningkatkan kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim). Pemberdayaan dan perlindungan tersebut terkait dengan kemampuan dalam menggunakan fasilitas pada saat pelaksanaan tugas dipasilitas kendaraan roda 4, senjata api *bodybest* dan borgol, alat komunikasih (Wawancara, 12/10/2021).

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak IPDA FAISAL ANANG SATRIA, S.Tr.K. sebagai Kanit Jatanras Polres Bulungan yaitu :

Para personil Satreskrim Polres Bulungan mampu bekerja sama dengan baik, karena sudah dibekali dengan pemberdayaan pelatihan dan dilengkapi dengan fasilitas yang menunjang kegiatan (Wawancara, 14/10/2021).

Adanya kegiatan pemberdayaan dan perlindungan para Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) sangat diperlukan guna mengoptimalkan dan mencapai tujuan organisasi dalam penanganan kasus pencurian motor di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Peningkatan Kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Dalam Menangani Curanmor Di Kabupaten Bulungan

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) tentunya ada faktor pendukung dan faktor penghambat sehingga yang dialami sehingga berdampak kepada efektifitas peningkatan kinerja personil. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat peningkatan kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

Peningkatan kinerja Reserse dan Kriminal (Satreskrim) dalam penanganan pencurian motor di Kabupaten Bulungan sangat penting mengingat bahwa di Kabupaten Bulungan pernah terjadi pencurian motor. Bertambahnya jumlah penduduk dan banyaknya pengangguran serta

meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan kendaraan bermotor tentu akan berdampaknya pada rentannya akan terjadi pencurian motor. Oleh karena itu, kepolisian perlu mengantisipasi hal tersebut supaya tidak terjadinya pencurian motor. Upaya yang perlu diantisipasi yaitu dengan adanya peningkatan kinerja personil Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dalam menangani kasus pencurian motor di Kabupaten Bulungan. Upaya untuk peningkatan kinerja tentunya harus adanya faktor pendukung sehingga peningkatan kinerja personil dapat berjalan dengan baik dalam menangani kasus pencurian motor di Kabupaten Bulungan.

Berikut hasil wawancara dengan Brigpol Teguh Rifai Bamin SatReskrim Polres Bulungan tentang faktor pendukung peningkatan kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

Ya menurut saya, personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) memiliki kemampuan dan potensi untuk mengembangkan diri dalam bekerja, mereka juga mampu bekerja sama dalam menangani kasus curanmor yang terjadi di wilkum Polres Bulungan, dan memiliki motivasi yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. (Wawancara, 12/10/2021).

Hasil wawancara dengan Bapak Iskandar, selaku masyarakat menyampaikan bahwa :

Saya melihat bahwa personil saling berkomunikasi dengan baik dan kerjasama yang, ketika ada curanmor, polisi yang lainnya juga sudah tau. Dengan demikian maka akan lebih efektif dalam menangani curanmor (Wawancara, 12/10/2021).

Selanjutnya hasil wawancara dengan Briptu Rahdianur Bamin Sat Reskrim Polres Bulungan yaitu :

Faktor pendukung dalam peningkatan kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan yaitu tersedianya dana untuk kegiatan pelatihan, memiliki kemampuan dalam mengembangkan diri personil, adanya kerja sama dengan pihak kepolisian dalam menangani atau memberantas curanmor, selalu mengevaluasi kinerja di lapangan, melakukan pelatihan untuk bekerja dengan baik (Wawancara, 12/10/2021).

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa faktor pendukung dalam upaya peningkatan kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan yaitu :

1. Adanya kerja sama yang baik antar personil sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam penanganan kasus pencurian motor.
2. Kesiapan dana untuk kegiatan pelatihan sangat penting mengingat bahwa dengan adanya dukungan dana, maka personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan dapat di latih kapan saja dan di mana saja
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan dalam menangain kasus pencurian motor diadakan sebagai uapaya untuk melakukan pembinaan dan pelatihan.

4. Memiliki kemampuan atau potensi diri dalam meningkatkan kinerja. Potensi diri tersebut merupakan bakat dan kemampuan secara fisik dalam menjalankan tugas.
5. Adanya kegiatan pelatihan terhadap Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan dalam menangani kasus pencurian motor.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam peningkatan kinerja Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan merupakan kendala yang dialami sehingga berdampak kepada kinerja. Mengingat bahwa tidak semua kasus laporan curanmor dapat ditangani oleh Satreskrim Polres Bulungan dengan maksimal.

Adapun hasil wawancara Bapak dengan Bapak Cahya Ade Saputra menyampaikan tentang faktor penghambat peningkatan kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan yaitu:

Menurut saya faktor penghambatnya yaitu kurangnya teknologi informasi yang dipergunakan dalam menjalankan pekerjaan dan sumber daya manusia yang terbatas (Wawancara, 14/10/2021).

Keterbatasan teknologi yang dimaksud yaitu CCTV (Closed Circuit Television) dan aplikasi yang menghubungkan semua informasi terkait dengan kasus curanmor di Kabupaten Bulungan. Personil Satuan Reserse Dan

Kriminal (Satreskrim) bisa dikatakan masih kurang di bidang penyelidikan karena di bidang tersebut dibutuhkan lebih banyak, mengingat bahwa personil tersebut akan ditugaskan kelapangan di berbagai daerah Kabupaten Bulungan ketika ada kasus pencurian motor.

Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bukungan Bapak AKP BELNAS PALI PADANG, SE., S.I.K. berpendapat bahwa :

Dari segi Penyelidikan : perlu adanya jaringan/informan di setiap wilayah tertentu, untuk mempermudah personil didalam melakukan penyelidikan, baik mencari informasi tentang pelaku atau pun Barang Bukti. Dari segi Penyidikan : perlu adanya TI yg memadai, untuk menunjang kinerja personil dengan baik, berhubung saat ini ditingkat penyidikan sudah menggunakan berbagai aplikasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan individu personil. Masih kurang beberapa personil, bila perlu ditambahkan personil lagi agar pelaku curanmor bisa teratasi (Wawancara, 14/10/2021).

Lebih lanjut disampaikan oleh Bapak IPDA FAISAL ANANG SATRIA, S.Tr.K. sebagai Kanit Jatanras Polres Bulungan mengatakan bahwa :

Faktor penghambat dalam peningkatan kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dalam kasus curanmor di Kabupaten Bulungan disebabkan karena kurangnya teknologi informasi, dan masih terbatasnya personil. (Wawancara, 14/10/2021).

Dari segi penyelidikan atau penyidikan hambatan yang ada yaitu kurangnya jumlah personil dan saat ini dapat diprediksikan antara personil

reskrim dengan jumlah laporan yang masuk 1 : 10, maka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih kurang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat peneliti simpulkan bahwa faktor penghambat dalam peningkatan kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dalam kasus curanmor di Kabupaten Bulungan yaitu :

1. Kurangnya jumlah personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dalam kasus curanmor di Kabupaten Bulungan sehingga berdampak pada efektivitas penyelidikan kasus.
2. Masih terbatasnya teknologi yang digunakan dalam kasus curanmor di Kabupaten Bulungan.

C. Pembahasan

Berikut ini pembahasan hasil penelitian yang sudah diperoleh selama dalam penelitian dengan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Upaya Peningkatan Kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Dalam Menangani Curanmor Di Kabupaten Bulungan

Adapun upaya peningkatan Kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Dalam Menangani Curanmor Di Kabupaten Bulungan yaitu:

a. Pendidikan dan Pelatihan

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di

Kabupaten Bulungan yaitu melalui pendidikan dan pelatihan . dimana pelatihan tersebut wajib diikuti oleh personil Satreskrim. Untuk membentuk sosok personil Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) dalam menangani Curanmor di Kabupaten Bulungan yang dimaksudkan di atas, diperlukan Diklat yang mengarah pada : Peningkatan semangat dan pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air; peningkatan kinerja teknis, peningkatan efisiensi, efektifitas, kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab sesuai dengan kebutuhan.

Kinerja personil Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) dalam menangani Curanmor di Kabupaten Bulungan tidak secara otomatis menjadi lebih baik Akan tetapi dapat terbentuk dari kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh personil. Pelatihan yang pernah diikuti oleh personil Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) diantaranya yaitu :

1. Pelatihan Penyidikan T.P.KDRT/PPA/RPK fungsi reskrimum tahun 2018.
2. Dikbangpes Bintara Dasar Reskrim 2020.
3. Pelatihan prigadir pemeriksaan saksi, ahli, dan tersangka fungsi teknis reskrimum, tahun 2016.
4. Pelatihan brigadier penyidikan T.P. Korupsi fungsi reskrimsus, tahun 2017.

Hasil penelitian ini sesuai dengan manfaat Pendidikan dan Pelatihan; yang disampaikan oleh Simamora (1995:29) menyebutkan manfaat-manfaat

yang diperoleh dari diadakannya pendidikan dan pelatihan (Diklat) yaitu: Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas, Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar-standar kinerja yang ditentukan, Menciptakan sikap, loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan, Memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia, Mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja, Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka.

Selanjutnya menurut Davis et al (dalam Mangkunegara, 2000), *reward* dalam perusahaan kerap dalam bentuk pemberian berupa piagam dan sejumlah uang dari perusahaan untuk pegawai yang mempunyai prestasi. Ada juga perusahaan yang memberikan *reward* kepada pegawai karena masa kerja dan pengabdianya dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya. Pemberian *reward* karena masa kerja pegawai bertujuan untuk memotivasi gairah dan loyalitas kepada organisasi.

Pencurian motor di Kabupaten Bulungan terjadi akibat meningkatnya kebutuhan dan kurangnya pendapatan sehingga pencuri motor tertarik melakukan pencurian. Untuk menangani permasalahan pencurian motor di Kabupaten Bulungan maka peningkatan kinerja personil Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) sangat penting. Pendidikan dan pelatihan yang diikuti dengan harapan yakni untuk mempersiapkan personil yang akan ditugaskan, dan memperbaiki kinerja lewat peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan personil.

Berikut ini jumlah pelaporan pencurian motor pada Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dalam 3 tahun terakhir.

No	Tahun	Jumlah	Kendaraan	Keterangan
1	2019	3	1. Jupiter 2. Mio 3. Satria	Dilaporkan
2	2020	2	1. Jupiter 2. Supra	Dilaporkan
3	2021	2	1. Mobil Avanza 2. Motor Revo	Dilaporkan

Sumber : Kantor Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim)

Dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa dari tahun ketahun mengalami penurunan tindakan pencurian kendaraan bermotor. Kendaraan yang dilaporkan tersebut ada sebagian dalam proses penyelidikan dan ada sebagian yang tidak dilaksanakan karena, kendaraan yang dilaporkan ternyata dipinjam dan tidak dikembalikan tepat waktu.

b. Promosi dan Mutasi

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan Kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) yaitu dengan adanya system promosi dan mutasi. Tetapi yang selama ini dilakukan yaitu adanya kegiatan mutasi personil. Mutasi yang dilakukan harus didasarkan pada kompetensi dan pendidikan yang dimiliki. Mutasi dan promosi jabatan harus berdasarkan *reward and punishment* yang terukur. Tujuannya guna penyegaran dan

perbaikan di tubuh Polri. Mutasi dilaksanakan dengan harapan supaya dapat meningkatkan kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan.

Mengadakan promosi serta mutasi karena hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Personil yang prestasi tentunya akan mendapatkan promosi dan mutasi yang lebih baik, tetapi personil yang tidak bekerja dengan baik, maka akan dimutasikan ketempat kerja lain.

c. Penilaian kinerja Polri

Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan sudah terlatih dikarenakan selalu meningkatkan kinerja dengan cara mengikuti Diklat pelatihan mengenai kerja dan kinerja di lapangan . dengan demikian kita tetap melakukan penilaian kinerja untuk mengukur ketercapaian kinerja personil. Kegiatan penilaian kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan sendiri dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing personil dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja, sehingga dapat diambil tindakan yang efektif semisal pembinaan berkelanjutan maupun tindakan koreksi atau perbaikan atas pekerjaan yang dirasa kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan.

Malakukan penilaian kinerja dengan harapan untuk memperbaiki kualitas kerja Penilian personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan. Penilaian tersebut tentu sangat bermanfaat bagi kami karena dengan demikian kami dapat mengetahui bagaimana dengan kinerja setiap personil di

Satreskrim. Penilaian Penilaian personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan dilakukan secara sistematis yaitu setiap tiga bulan sekali untuk mengetahui hasil pekerjaan personil.

Penilaian kinerja terhadap personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan biasanya dilakukan oleh Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bulungan untuk memberikan penilaian personil. Peneilaian yang dilakukan mencakup kemampuan dalam menjalankan tugas, tingkat kehadiran dalam menjalankan tugas dan taat terhadap peraturan yang ditetapkan. Tujuan evaluasi kinerja yaitu untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi.

d. Penghargaan

Dalam upaya meningkatkan kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan tentu kita harus memberikan penghargaan atas prestasi yang ditunjukan. Penghargaan kepada Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) ketika mereka mampu menjalankan tugas mereka dengan baik. Selain dari pada itu, *punishment* diberikan bagi personil yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas mereka.

Penghargaan tersebut diberikn dikarenakan dalam menangani kasus curanmor tersebut personil Sat Reskrim tersebut bekerja dengan baik dan mampu bekerja dalam hubungan Tim dan selalu mengevaluasi kinerja di lapangan. Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh personil Polres

Bulungan selalu memperhatikan SOP yang ada, dan melakukan pelatihan untuk bekerja dengan baik.

Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk sertifikat dan uang pembinaan, dan ada dalam bentuk pujian diumumkan kepada personil kepolisian. Penghargaan atau Reward adalah ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar Personil Satuan Reserse Dan Kriminal menjadi lebih giat lagi usahanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai. Pemberian reward dimaksudkan sebagai dorongan agar Personil Satuan Reserse Dan Kriminal mau bekerja dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam menangani pencurian motor.

e. Pemberdayaan dan perlindungan Polri

Pemberdayaan dan perlindungan dilakukan terhadap Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dengan harapan dapat meningkatkan kinerja. Pemberdayaan Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) yaitu upaya untuk membangun kemampuan dalam bekerja sama, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Fasilitas dan perlengkapan dalam menjalankan tugas untuk menangani pencurian motor tentu dapat meningkatkan kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim). Dengan perlindungan yang ada, personil tentu akan merasa aman dan terlindungi dalam menjalankan tugas.

Pemberdayaan yang dilakukan yaitu dengan mengajak berpartisipasi dalam kegiatan dan membagikan jadwal tugas. Dengan adanya jadwal yang ditetapkan, maka Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) akan lebih bertanggung jawab. Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dapat bekerja efektif, karena dalam menangani kasus curanmor baik penyidik dan anggota lapangan dapat bekerja sama. Melalui kerja sama yang baik, penanganan curanmor akan lebih efektif. Adanya kegiatan pemberdayaan dan perlindungan para Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) sangat diperlukan guna mengoptimalkan dan mencapai tujuan organisasi dalam penanganan kasus curanmor di Kabupaten Bulungan.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) terkait dengan pencurian kendaraan bermotor sudah mendapatkan nilai yang baik. walaupun secara keseluruhan dalam penanganan pencurian motor belum berjaan dengan maksimal. namun melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tentu berdampak positif bagi Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) untuk meningkatkan kinerja lebih baik.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat peningkatan kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan sebagai berikut :

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam upaya peningkatan kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan yaitu :

1. Kerja sama personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim)

Faktor pendukung dalam upaya peningkatan kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dapat terlihat pada adanya kerja sama yang baik anatar personil dalam menjalankan tugas. Kerja sama tersebut dilaksanakan dalam menjalankan tugas baik saat di lapangan ataupun di kantor. Kerja sama tersebut berupa saling berkoordinasi, saling memberikan informasi, dan taat terhadap tugas yang diberikan.

2. Kesiapan Dana

Factor pendukun selanjutya dalam upaya peningkatan kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) yaitu adana dana untuk kegiatan pelatihan. Dengan adanya dukungan dana, maka personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan dapat dilatih sesuai denga pendidikn yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas.

3. Melakukan evaluasi

Evaluasi kierja meruapakan bagian dari upaya peningkatan kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dalam menangi kasus

curanmor. Evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat memperbaiki kinerja personil dan untuk melakukan pembinaan dan pelatihan lebih lanjut.

4. Memiliki Kemampuan

Secara fisik, personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas, mereka juga memiliki bakat serta keterampilan yang dapat dikembangkan lebih baik. Dengan kemampuan yang dimiliki, tentu akan mempermudah dalam kegiatan pelatihan selanjutnya.

5. Adanya Kegiatan pelatihan

Factor pendukung dalam peningkatan kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) yaitu adanya kegiatan pelatihan. Jadi setiap tugas baru yang akan diberikan maka akan dilatih dan diberikan pendidikan sehingga optimal dalam menjalankan tugas.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam peningkatan kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dalam kasus curanmor di Kabupaten Bulungan yaitu :

a. Jumlah personil Kurang

Dalam menjalankan tugas, salah satu faktor pendukung yaitu banyaknya jumlah personil. Tetapi Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Kabupaten Bulungan saat ini masih terbatas, terutama dalam penyelidikan

kasus curanmor di Kabupaten Bulungan. Jumlah personil yang terbatas menghambat personil untuk melaksanakan tugas karena pembagian tugas sangat berat

b. Teknologi Terbatas

Teknologi informasi yang penting bagi personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) dalam menjalankan tugas. Teknologi tersebut sangat penting untuk menyebar luaskan laporan terkait dengan curanmor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Peningkatan Kinerja Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) Dalam Menangani Curanmor Di Kabupaten Bulungan yaitu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan/diklat dimana pelatihan tersebut wajib diikuti oleh personil Satreskrim. Promosi dan Mutasi, bagi personil yang memiliki kemampuan dan memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Penilaian kinerja Polri dimaksudkan untuk mengukur kinerja masing-masing personil dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas kerja. Penghargaan diberikan dalam bentuk sertifikat dan uang pembiaa, dan pujian yang bertujuan meningkatkan motivasi personil. Pemberdayaan Personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) yaitu upaya untuk membangun kemampuan dalam bekerja sama, mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya. Fasilitas dan perlengkapan dalam menjalankan tugas menangani curanmor tentu dapat meningkatkan kinerja personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim).

2. Faktor pendukung peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan yaitu Kerja sama personil Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim), kesiapan dana, melakukan evaluasi, memiliki kemampuan secara fisik, dan adanya kegiatan pelatihan. Sedangkan faktor penghambat peningkatan kinerja personil satuan reserse dan kriminal (Satreskrim) dalam menangani curanmor di Kabupaten Bulungan yaitu jumlah personil yang terbatas menghambat personil untuk melaksanakan tugas karena pembagian tugas sangat berat, dan terbatasnya teknologi informasi yang digunakan oleh personil dalam menjalankan tugas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) perlu adanya penambahan personil sehingga dapat membagikan tugas sesuai dengan kapasitas dan kuantitas personil.
2. Perlu Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim) mengadakan aplikasi teknologi informasi terkait dengan curanmor. Yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian dan penerimaan informasi kepada personil.
3. Perlu adanya peningkatan kapasitas dalam mengatministrasi pelaporan pencurian motor pada Satuan Reserse Dan Kriminal (Satreskrim).
4. Perlu adanya kerja sama dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus curanmor.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Edisi Revisi 2010*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Dessler, Gary. (2006). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gibson, James L., Ivancevich, John M., Donnelly, James H. (1994). *Organization: Behaviour, Structure, and Processes*, 8th . Newyork: Irwin Inc.
- Greenberg, J., & Baron, R.A. (1993). *Behavior in Organizations*. Boston: Allyn & Bacon.
- Grote, Dick. (1996). *The Complete Guide to Performance Appraisal*. New York: Amacom, American Management Association.
- Judge, T. A., Boudreau, J. W.; & Bretz, R. D. (1994). "Job and Life Attitudes of Male Executives". *Journal of Applied Psychology*, Vol. 79 No.5, pp. 762-782.
- Luthans, Fred, (2018). *Organizational Behavior: Personality and Attitudes, Eight Edition*. New York: McGraw Hill International Edition.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mathis, R. L., & Jackson, J.H. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miles, Matthew & Huberman, A. Michael. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press
- Nawawi, Hadari. (2001). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prawirosentono, Suyadi. (2008). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Rivai, Veithzal. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Robbins, Stephen P & Judge, Timothy A. (2004). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. (2003). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Roberts, Gary E. & Reed, Tammy. (1996). Performance appraisal participation, goal setting and feedback. *Review of Public Personnel Administration*. Pp. 29-60
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. (2010). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Umar, Husein. (2005). *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Untung Priyono. 2016. Peningkatan Kapasitas Aparatur. Vol 2 Jurnl Publikasi.

LAMPIRAN



YAYASAN PENDIDIKAN TANAH SERIBU
UNIVERSITAS KALTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

Kampus Unikalar Jalan Sengkawit Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
Telepon (0552) 23190, unikalar.ac.id

Nomor : 004/IP/AN-Fisipol/Unikalar/IX/2020 Tanjung Selor, 29 September 2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. **Kepala Kepolisian Resor Bulungan**
Cq. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kaltara, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan Izin Penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Zainal Arifin
NPM : 201651043
Semester : IX (sembilan)
Metode Penelitian : Analisis Kualitatif
Lama Penelitian : 29 September 2020 s.d 29 Januari 2021
Judul Skripsi : **UPAYA PENINGKATAN KINERJA PERSONIL SATUAN
RESEKSE DAN KRIMINAL (SATRESKRIM) DALAM
MENANGANI CURANMOR DI KABUPATEN
BULUNGAN**

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua Program Studi
Syaini, S. Sos., M. IP
NIDN. 1103108201



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN UTARA
RESOR BULUNGAN

Jalan Agathis 04 Tanjung Selor, 77212

Tanjung Selor, 05 Oktober 2020

Nomor : B / 139 / X / 2020 / Reskrim
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian sebagai tugas akhir
Mahasiswa UNIKALTARA

Kepada

Yth. Ketua Program Studi Administrasi
Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Unikaltara

Di-

Tanjung Selor

Menindak Lanjuti surat nomor : 004/IP/AN-Fisipol/Unikaltara/IX/2020 tanggal 29 September 2020 tentang permohonan izin penelitian "UPAYA PENINGKATAN KINERJA PERSONIL SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL (SAT RESKRIM) DALAM MENANGANI CURANMOR DI KABUPATEN BULUNGAN" sebagai tugas akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) atas nama :

Nama : ZAINAL ARIFIN
NPM : 201651043
Semester : IX (Sembilan)

Telah kami setuju dan izinkan yang bersangkutan melakukan penelitian sesuai dengan judul "UPAYA PENINGKATAN KINERJA PERSONIL SATUAN RESERSE DAN KRIMINAL (SAT RESKRIM) DALAM MENANGANI CURANMOR DI KABUPATEN BULUNGAN".

Demikian surat ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk kepentingan seperlunya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Saudara/i

di tempat

Dengan hormat,

Saya dengan kerendahan hati mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada lampiran ini. Pertanyaan ini saya ajukan guna memperoleh data sebagai bekal melakukan proses penelitian dalam rangka penyusunan skripsi saya, dengan judul “Upaya Peningkatan Kinerja Personil Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Dalam Menangani Curanmor di Kabupaten Bulungan”.

Bersama ini pula, perlu saya sampaikan, bahwa jawaban yang Anda berikan hanya untuk kepentingan penelitian untuk pengerjaan tugas akhir saya semata, dan informasi yang diberikan dijamin kerahasiaannya. Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

PEDOMAN WAWANCARA

(Kepada Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan)

1. Bagaimanakah kasus curanmor di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

2. Dalam penanganan kasus curanmor, bagaimanakah kualitas kerja personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan? Dan apakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas kerja tersebut? Mohon jelaskan!

Jawaban:

3. Berapakan jumlah kasus curanmor yang dapat diberantas personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan dalam satu bulan? Dan apakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kuantitas dari jumlah kasus yang dapat ditangani? Mohon jelaskan!

Jawaban:

4. Apakah kinerja personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan dapat diandalkan dalam menangani curanmor? Dan apakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan keandalan kerja personil? Mohon jelaskan!

Jawaban:

5. Apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan dapat bekerja secara efektif dalam menangani curanmor? Dan apakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektifitas kerja personil tersebut? Bagaimanakah cara kerja yang efektif tersebut?

Jawaban:

6. Dalam penanganan kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan mampu bekerja secara mandiri? Dan apakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kemandirian kerja tersebut? Mohon jelaskan!

Jawaban:

7. Dalam penanganan kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan memiliki komunikasi yang baik dengan atasan dan rekan kerja? Dan apakah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki komunikasi dalam bekerja tersebut? Mohon jelaskan!

Jawaban:

8. Dalam penanganan kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan mampu bekerja sama dengan baik? Dan apakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan kerjasama tersebut? Mohon jelaskan!

Jawaban:

9. Dalam upaya peningkatan kinerja personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan, apakah saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam peningkatan kinerja personi ? Mohon jelaskan!

Jawaban:

10. Dalam bekerja untuk menangani kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan memiliki motivasi yang baik? Mohon jelaskan!

Jawaban:

11. Dalam bekerja untuk menangani kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan memiliki latar belakang pendidikan yang kompeten? Mohon jelaskan!

Jawaban:

12. Dalam bekerja untuk menangani kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan sudah terlatih? Mohon jelaskan!

Jawaban:

13. Dalam bekerja untuk menangani kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan memiliki peralatan yang memadai? Mohon jelaskan!

Jawaban:

14. Dalam bekerja untuk menangani kasus curanmor, apakah kesejahteraan personil Satuan Reserse Kriminal Polres jga diperhatikan agar mereka bisa bekerja dengan baik? Mohon jelaskan!

Jawaban:

PEDOMAN WAWANCARA

(Kepada Pihak Personil Satrekrim Polres Bulungan)

1. Bagaimanakah kasus curanmor di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

2. Dalam penanganan kasus curanmor, bagaimanakah kualitas kerja personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan? Dan apakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas kerja tersebut? Mohon jelaskan!

Jawaban:

3. Berapakan jumlah kasus curanmor yang dapat diberantas personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan dalam satu bulan? Dan apakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kuantitas dari jumlah kasus yang dapat ditangani? Mohon jelaskan!

Jawaban:

4. Apakah kinerja personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan dapat diandalkan dalam menangani curanmor? Dan apakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan keandalan kerja personil? Mohon jelaskan!

Jawaban:

5. Apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan dapat bekerja secara efektif dalam menangani curanmor? Dan apakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektifitas kerja personil tersebut? Bagaimanakah cara kerja yang efektif tersebut?

Jawaban:

-
-
6. Dalam penanganan kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan mampu bekerja secara mandiri? Dan apakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kemandirian kerja tersebut? Mohon jelaskan!

Jawaban:

7. Dalam penanganan kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan memiliki komunikasi yang baik dengan atasan dan rekan kerja? Dan apakah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki komunikasi dalam bekerja tersebut? Mohon jelaskan!

Jawaban:

8. Dalam penanganan kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan mampu bekerja sama dengan baik? Dan apakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan kerjasama tersebut? Mohon jelaskan!

Jawaban:

9. Dalam upaya peningkatan kinerja personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan, apakah saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam peningkatan kinerja personi ? Mohon jelaskan!

Jawaban:

10. Dalam bekerja untuk menangani kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan memiliki motivasi yang baik? Mohon jelaskan!

Jawaban:

11. Dalam bekerja untuk menangani kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan memiliki latar belakang pendidikan yang kompeten? Mohon jelaskan!

Jawaban:

12. Dalam bekerja untuk menangani kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan sudah terlatih? Mohon jelaskan!

Jawaban:

13. Dalam bekerja untuk menangani kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan memiliki peralatan yang memadai? Mohon jelaskan!

Jawaban:

14. Dalam bekerja untuk menangani kasus curanmor, apakah kesejahteraan personil Satuan Reserse Kriminal Polres jga diperhatikan agar mereka bisa bekerja dengan baik? Mohon jelaskan!

Jawaban:

PEDOMAN WAWANCARA
(Kepada Pihak Masyarakat Bulungan)

1. Bagaimanakah kasus curanmor di Kabupaten Bulungan?

Jawaban:

2. Dalam penanganan kasus curanmor, menurut Anda bagaimanakah kualitas kerja personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan? Mohon jelaskan!

Jawaban:

3. Menurut Anda, apakah kinerja personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan dapat diandalkan dalam menangani curanmor? Mohon jelaskan!

Jawaban:

4. Menurut Anda, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan dapat bekerja secara efektif dalam menangani curanmor?

Jawaban:

5. Menurut Anda, apakah dalam penanganan kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan mampu bekerja secara mandiri? Mohon jelaskan!

Jawaban:

6. Menurut Anda, apakah dalam penanganan kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan mampu bekerja sama dengan baik? Mohon jelaskan!

Jawaban:

7. Dalam upaya peningkatan kinerja personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya? Mohon jelaskan!

Jawaban:

8. Menurut Anda, dalam bekerja untuk menangani kasus curanmor, apakah personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan sudah memiliki kinerja yang baik? Mohon jelaskan!

Jawaban:

9. Apakah Anda selaku masyarakat merasa aman dari kasus curanmor, karena adanya penanganan dari personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan? Mohon jelaskan!

Jawaban:

10. Menurut Anda, apakah kekuarangan personil Satuan Reserse Kriminal Polres Bulungan dalam menangani curanmor? Mohon jelaskan!

Jawaban:

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN



Kegiatan wawancara dengan Briptu Jerry Ananda Jabatan Bamin Sat Reskrim



Kegiatan wawancara dengan Brigpol Teguh Rifai Bamin Sat Reskrim Polres Bulungan



Kegiatan wawancara dengan Briptu Rahdianur Bamin Sat Reskrim Polres Bulungan



Dokumentasi dengan Bapak Cahya Ade Saputra



Dokumentasi wawancara Dengan Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bulungan Bapak AKP BELNAS PALI PADANG, SE., S.I.K.



Dokumetasi wawancara dengan Kanit Jatanras Polres Bulungan Bapak IPDA FAISAL ANANG SATRIA, S.Tr.K.



Dokumentasi wawancara Dengan Honor Dinas Perhubungan Ibu Sariwati



Dokumentasi dengan Bapak Iskandar selaku masyarakat